# MINORITAS ISLAM DI FILIPINA
# (KAJIAN SEJARAH KONFLIK ANTARA PEMERINTAH FILIPINA DAN MASYARAKAT MUSLIM MORO TAHUN 1960-1996)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1) Pada Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)**

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K A.2012 06 SPI
No. REG A.2012/SPI/06
ASAL BUKU :

**Oleh :**
**NURDIANAH**
**NIM : AO.22.08.034**

**PEMBIMBING :**
**DR. AHMAD NUR FUAD, MA.**
**NIP. 196411111993031002**

**FAKULTAS ADAB**
**JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**
**SURABAYA**
**2012**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nurdianah

NIM : A02208034

Jurusan : Sejarah dan Peradaban Islam

Fakultas : Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 2 Juli 2012

Saya yang menyatakan,

Materai

METERAI TEMPEL

586C2AAF924363490

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Nurdianah

NIM A02208034

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurdianah (NIM A02208034)
Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 28 Juni 2012

Pembimbing

Dr. Ahmad Nur Fuad, MA.
NIP. 196411111993031002

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji oleh Tim Penguji dan dinyatakan Lulus

Pada tanggal 16 Juli 2012

| | | |
|---|---|---|
| Ketua/Pembimbing | : Dr. Ahmad Nur Fuad, MA. | (.....) |
| Penguji I | : M. Khodafi, S.Sos., M.Si. | (.....) |
| Penguji II | : Drs. Nur Rokhim, M.Fil.I. | (.....) |
| Sekertaris | : Dwi Susanto, S.Hum., MA. | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS ADAB IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**Dr. Kharisudin, M.Ag.**
**NIP. 196807171993031007**

# ABSTRAK

Nurdianah, 2012 : Minoritas Islam Di Filipina (Kajian Sejarah Konflik Antara Pemerintah Filipina dan Masyarakat Muslim Moro Pada Tahun 1960-1996). Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Konflik di Filipina Selatan merupakan konflik yang sudah lama terjadi. Konflik tersebut berawal dari datangnya kolonial ke Filipina. Kemudian pada tahun 1960-1996 konflik terjadi antara Pemerintah Filipina dengan Muslim Moro. Maka dari, dalam skripsi ini penulis mencoba menjawab persoalan-persoalan tentang konflik di Filipina Selatan. Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana terjadinya konflik antara Pemerintah Filipina dengan masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan. 2. Bagaimana munculnya kelompok-kelompok perlawanan masyarakat Muslim Moro terhadap Pemerintah Filipina. 3. Bagaimana proses penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dengan masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan Pendekatan diakronis dan sinkronis serta metode sejarah, yang digunakan untuk mengungkapkan sejarah konflik yang telah terjadi di Filipina Selatan. Adapaun teori yang digunakan yaitu teori Postkolonial, teori Pascakolonial dan teori Nationalism and ethnic conflict. Salah satu sumber yang digunakan penulis, yaitu *Dinamika Islam Filipina* karya Cesar A. Majul, *Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal* karya Syahbuddin Mangandaralam, dan *The Secret of Jihad Moro: Fakta-Fakta Perlawanan Kaum Tertindas Muslim Moro* karya Abu Ibrahim Muhammad Daud.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, 1. Konflik muncul berasal dari datangnya kolonial Spanyol dan Amerika, setelah itu terjadi konflik antara Pemerintah Filipina dengan Muslim Moro, 2. Terdapat tekanan-tekanan yang dialami Muslim Moro, yang berakibat berdirinya gerakan-gerakan separatis, 3. Penyelesaian konflik dengan diadakannya perundingan-perundingan dan menghasilkan resolusi damai antara Pemerintah dengan Muslim Moro.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRACT

Nurdianah, 2012 : Manority of Islam in Philippines (Study Conflict History Between Philippines Governments and Community of Moro's Muslim in the 1960-1996). Adab Faculty, State Institute for Islamic Student Sunan Ampel Surabaya.

Conflict in south Philippine is the conflict that happens in the past. That conflict was begun from coming of colonial to the Philippine. Then in the 1960-1996, conflict happened between Philippine governments with Moro's Muslim. So, in this skripsi the writer tries to answer the problems about conflict in the south Philippine. There are problem which is submitted in this skripsi are: 1. How did happen conflict between Philippine government with community of Moro's Muslim in south Philippine. 2. How did appear groups of against from community of Moro's Muslim about Philippine governments. 3. How did process of finishing conflict between Philippine government and Moro's Muslim in south Philippine.

In this skripsi the writer use diachronic and synchronic phenomenological and history method, used to uttered conflict history that happened in south Philippine. Those theories such as: post colonialism, Pascal Colonialism, nationalism and ethnic conflict theory. The one of the sources that used by writer, is: *Dinamika Islam Filipina* by Caesar A. Majul, *Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal* by Syahbuddin Mangandalaralam, and *The Secret of Jihad Moro: Fakta-Fakta Perlawanan Kaum Tertindas Muslim Moro* by Abu Ibrahim Muhammad Daud.

From this research can be concluded that: 1. Conflict appear from the coming of colonial of Spain and America, after that happen conflict between Philippine government and Moro's Muslim, 2. There are compressions that is experienced by Moro's Muslim, and it is causes of movals of separatist, 3. The finishing of conflict by created negotiations and produc solution of peace between government and Moro's Muslim.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... iv

MOTTO ..... v

PERSEMBAHAN..... vi

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR ..... ix

DAFTAR ISI..... xi

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian ..... 10

D. Kegunaan Penelitian ..... 10

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik ..... 11

F. Penelitian Terdahulu ..... 15



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian ..... 16

H. Sistematika Bahasan ..... 18

BAB II : KONFLIK ANTARA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN MASYARAKAT MUSLIM MORO DI FILIPINA SELATAN

A. Latar Belakang Terjadinya Konflik..... 20

B. Perkembangan Konflik mulai pemerintah Marcos sampai Aquino ..... 30

1. Konflik pada Pemerintah Marcos.....30

2. Konflik pada Pemerintah Aquino..... 39

BAB III : GERAKAN-GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT MUSLIM MORO DI FILIPINA SELATAN

A. Munculnya Gerakan-Gerakan Perlawanan di Filipina Selatan.....42

B. Gerakan-Gerakan Islam di Filipina Selatan..... 42

1. Gerakan MNLF (Moro National Liberation Front)..... 42

2. Gerakan MILF (Moro Islamic Liberation Front)..... 48

a. Metode Perjuangan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*)..51

3. Gerakan Abu Sayyaf..... 53



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : PENEYELESAIAN KONFLIK ANTARA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN MASYARAKAT MUSLIM MORO DI FILIPINA SELATAN

A. Urgensi Penyelesaian Konflik..... 57

B. Perjanjian Tripoli Tahun 1976..... 62

C. Resolusi Kongres Islam Filipina Tahun 1981.....68

D. Perjanjian Damai Tahun 1996.....70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....74

B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara adalah salah satu wilayah yang banyak menganut agama Islam. Wilayah tersebut sebelah Timur India sampai laut Cina yang mencakup Indonesia, Malasyia dan Filipina Selatan yang terletak di Negara Filipina. Harry Benda membagi Asia Tenggara menjadi tiga (3) wilayah kutural atau berdasarkan atas pengaruh yang diterima wilayah tersebut. *Pertama*, wilayah *Indianized Sotheast Asia* adalah Asia Tenggara yang telah dipengaruhi orang-orang India (di-India-kan), seperti kerajaan kuno di Indonesia beragama Hindu dan Budha. *Kedua*, wilayah *Sinicized Southeast Asia* adalah Asia Tenggara yang telah dipengaruhi orang-orang Cina (di-Cina-kan) yaitu Negara Vietnam. *Ketiga*, wilayah *Hispanized Southeast Asia* adalah wilayah Asia Tenggara yang telah dipengaruhi orang-orang Spanyol (di-spanyol-kan) yaitu Negara Filipina.[1] Dari pembagian tersebut, Filipina termasuk Negara yang dipengaruhi oleh Spanyol.

Dalam penelitian ini penulis akan mefokuskan pembahasan tentang konflik antara kaum Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina. Konflik di Selatan Filipina telah berlangsung sejak lama. Konflik ini merupakan konflik yang awalnya berkaitan dengan agama dan tanah. Namun, lama kelamaan konflik ini

---

[1] Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), vi-vii.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan geografi, sejarah dan juga faktor kepentingan. Hanya saja konflik ini mengalami pasang surut.

Filipina merupakan negara yang berada di Asia Tenggara yang mempunyai 7107 pulau, yang menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda-beda. Dari banyaknya dialek bahasa yang berbeda-beda mencerminkan Filipina mempunyai suku dan komunitas etnis yang banyak. Kelompok etno-linguistik yang ada di Filipina, misalnya Maranao, Maguindanao, Tausug, Somal, Yakan, Ira Nun, Jamamapun, Badjao, Kalibugan, Kalagan Sangil.[2]

Agama Islam di Filipina merupakan agama terbesar yang kedua. sedangkan agama yang mendominasi atau mayoritas di Filipina adalah agama Katolik. Minoritas Muslim di Filipina dikenal dengan sebutan Muslim "Moro" (sebutan orang-orang Islam), komunitas Muslim Moro tersebut tinggal di kepulauan Mindanao dan Kepulauan Sulu. Pada tahun 1975 jumlah orang Islam di Filipina sebanyak 3 juta orang Islam atau 7% dari seluruh jumlah penduduk negara tersebut adalah 42.070.600. Kelompok-kelompok Islam Filipina perkiraan pada tahun 1975 adalah Maguindanao, Maranao dan Iranun, Tausug, Samal, Yakan, Jama Mapun, Palawani dan Molbog (kelompok-kelompok palawan), Kalagan, Kolibugan, dan Sangil. Filipina selatan mayoritas beragama Islam terletak di kepulauan Mindanao dan kepulauan Sulu. Di kepulauan Mindanao

[2]Asy'ari, Akhwan Mukarrom dan Shonhaji, *Pengantar Studi Islam* ( Surabaya: IAIN AMPEL PRESS, 2008), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat kelompok terbesar yang penduduknya mayoritas beragama Islam yang dinamakan kelompok orang Maguindanao yang tinggal di Cotabato.[3]

Islam masuk ke Filipina pada tahun 1210 M, yang bertepatan pada awal abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para dai yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Setelah itu berdirilah kesultanan-kesultanan Islam yang mempunyai pemerintahan dan kedaulatan, di antaranya Kesultanan Sulu dan Kesultanan Mindanao.[4]

Dilihat dari segi kronologi sejarah perjuangan masyarakat Moro dapat dibagi menjadi 3 periode: *pertama*, Moro berperang melawan penjajah Spanyol pada tahun 1521-1898 selama 377 tahun, pada abad ke-16. *Kedua*, Moro berusaha membebaskan diri dari penjajah Amerika selama 47 tahun yang dimulai pada tahun 1898-1946. *Ketiga*, Moro melawan pemerintah Filipina pada tahun 1970-sekarang.[5]

Kedatangan orang-orang Spanyol di Filipina pada abad-16 bertujuan untuk mendirikan daerah jajahan dan Kristensasi terhadap orang-orang Islam, terutama pada orang-orang pribumi yang berada di Filipina. Ketika orang-orang Spanyol berhasil memasukkan orang-orang pribumi ke dalam agamanya, kaum pribumi dijadikan sekutu sebagai prajurit atau pelempar tombak dalam

---

[3] Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina*, Terj. Eddy Zainurry (Jakarta: LP3ES, 1989), 2-3.

[4] Abu Ibrahim Muhammad Daud, *The Secret of Jihad Moro: Fakta-Fakta Perlawanan Kaum Tertindas Moro* (Solo: media ISLAMIKA, 2008), 66.

[5] Asy'ari, Ahwan Mukarrom dan Shonhaji, *Pengantar Studi Islam* ( Surabaya: IAIN AMPEL PRESS, 2008), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertempuran, untuk menyerang perkampungan-perkampungan dan benteng-benteng Islam. Sejarah peperangan yang panjang antara orang-orang Spanyol dan Islam dinamakan *Perang Moro*. Akibat dari Perang Moro terjadi ketegangan dan konflik antara orang-orang Kristen dan Islam Filipina.[6] Kolonial Spanyol menamakan orang Islam dengan sebutan "Moro", sedangkan orang-orang pribumi yang masuk Kristen disebut "Indio". Dari peristiwa tersebut orang Spanyol dan kaum Kristen pribumi dianggap sebagai musuh Islam yang abadi.

Pada tahun 1898 orang-orang Amerika berhasil merebut kekuasaan di Filipina dari tangan Spanyol. Amerika menginginkan antara orang Kristen dan orang Islam mengurangi rasa permusuhan yang mendalam. Maka dari itu, salah satu cara yang dilakukan oleh orang-orang Amerika adalah mengharuskan orang-orang Kristen untuk tinggal di Mindanao dan mengirimkan orang-orang Kristen lainnya untuk tinggal di daerah-daerah Islam lainnya. Dari pemaparan di atas, tampak bahwa Amerika mempunyai rencana untuk membaratkan orang-orang Islam dan menanamkan benih-benih ketenangan dan konflik antara dua komunitas tersebut.

Hubungan Amerika dengan Muslim Filipina lebih baik dibandingkan dengan penjajah Spanyol, karena kebijakan Amerika memberikan kebebasan kepada orang Islam dalam menjalankan kehidupan beragama serta kebiasaan-kebiasaan ritualnya. Akan tetapi, Amerika membenci dan mencurigai orang Islam, karena pada dasarnya Islam datang dari luar negeri, khususnya dari Arab

[6] Majul, *Dinamika Islam Filipina*, 9-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan orang-orang Islam bagian Selatan. Oleh sebab itu, Amerika mempersempit kontak komunikasi antara orang-orang Islam di Filipina dengan saudara-saudaranya di pulau terdekat, khususnya pulau Kalimantan atau pulau-pulau lainnya di Indonesia.[7]

Konflik Mindanao merupakan konflik yang sangat klasik. Konflik tersebut melibatkan penduduk Mindanao dan penduduk luar Mindanao. Awal konflik Mindanao berasal dari perlawanan masyarakat Moro terhadap kolonial Spanyol. Setelah itu pada periode berikutnya, wilayah tersebut dikuasai oleh kolonial Amerika Serikat. Sikap para kolonial antara Amerika dan Spanyol terdapat perbedaan. Perbedaannya terletak pada sikap kolonial Amerika terhadap masyarakat Moro di Mindanao yang bersahabat dan menjalin kerjasama, meskipun Amerika mempunyai rencana ingin mengambil keuntungan yang besar dari Negara Filipina, khususnya wilayah Mindanao.

Pada 4 Juli 1946 Negara Filipina mengalami kemerdekaan, yang memproklamasikan sebagai Negara Republik. Setelah itu Filipina memeperoleh kemerdekaan, masyarakat Moro ingin melanjutkan perjuangannya. Masyarakat Muslim Moro ingin terjun ke dunia politik, akan tetapi pemerintah Filipina mempersulit mereka masuk ke dalam dunia politik dengan beberapa alasan: *pertama*, orang-orang Islam sulit menerima undang-undang nasional, karena undang-undang tersebut berasal dari nilai-nilai Barat dan Katolik. *Kedua*, orang-orang Islam tidak ingin anak-anaknya bersekolah di Republik, karena sistem

[7] Ibid., 13&15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah yang digunakan tidak jauh beda dengan sistem sekolah yang digunakan orang-orang Amerika. *Ketiga*, orang-orang Islam sulit menganggap dirinya sebagai warga Negara Republik, karena terdapat kebencian yang mendalam terhadap orang-orang Kristen.[8]

Pemerintahan Filipina yang baru melanjutkan kebijakan para kolonial, yaitu melakukan tindakan-tindakan menekan dan menghambat gerakan masyarakat Muslim Moro. Pemindahan orang-orang Kristen yang ada di Filipina dilakukan secara terus-menerus ke bagian Mindanao di daerah Cotabato, sehingga Mindanao yang dahulu mayoritas beragama Islam menjadi wilayah minoritas Islam. Pemerintahan Presiden Ramon Magsaysay (1953-1957) mengeluarkan keputusan undang-undang tentang hak-hak tanah kepada orang-orang Kristen yang tinggal di wilayah Mindanao. Keputusan tersebut seperti yang dilakukan oleh kolonial Amerika yang memberikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat Muslim Moro kepada orang-orang Kristen yang tinggal di Mindanao.[9]

Sejak tahun 1960-an sampai awal 1970-an, terjadi perlawanan antara pendatang Kristen Filipino bagian utara Filipina dan penduduk asli masyarakat Muslim Moro di wilayah Mindanao bagian selatan Filipina. Perlawanan tersebut berawal dari adanya perpindahan penduduk Kristen ke tempat tinggal orang-orang Islam di Mindanao. Dampak dari peristiwa tersebut banyak tanah-tanah

---

[8] Ibid., 23-25.
[9] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepunyaan orang-orang Islam di Mindanao diduduki dan dimiliki secara paksa oleh pendatang Katolik. Permasalahan tanah tersebut menandai semakin memuncaknya konflik antara Muslim Moro dan Katolik Filipina. akibat dari konflik tersebut, melahirkan organisasi-organisasi dari kelompok Katolik pendatang dan penduduk asli Muslim Moro di Mindanao.

Organisasi Islam Moro yang muncul di Filipina Selatan ada 3 yaitu *pertama*, MNLF *(Moro National Liberation Front)* adalah organisasi Islam yang bertujuan untuk memerdekaan diri (*Self-Determination*), *kedua* MILF kelompok pecahan dari MNLF yang memisahkan dari MNLF pada tahun 1977 akan tetapi secara resmi baru didirikan pada tahun 1984, dan *ketiga* kelompok Abu Sayaf didirikan pada tahun 1991.[10]

Munculnya organisasi-organisasi perlawanan di wilayah Mindanao Filipina Selatan, memiliki tujuan untuk membebaskan masyarakat Moro dari pemerintahan pusat Filipina. Mereka disebut sebagai kaum "Separatis". Dari pemberontakan Moro, Pemerintah Filipina membentuk suatu perdamaian. Perjanjian perdamaian dilakukan antara pemerintahan Filipina dan masyarakat Muslim Moro, yang diwakili oleh gerakan MNLF (*Moro National Liberation*

[10] John Gershman,"*Peta dan Prospek Gerakan Islam di Filipina*"dalam *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, ed. Moeflich Hasbullah (Bandung: FOKUSMEDIA, 2003), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Front*). Akan tetapi dari perdamaian tersebut tidak sepenuhnya ditaati atau berjalan sesuai dengan keinginan keduanya.[11]

Pemberontakan dilakukan oleh kelompok orang-orang Muslim di Kepulauan Mindanao dan Kepulauan Sulu, merupakan benteng Islam di Asia Tenggara. Terdapat empat faktor yang menyebabkan Moro mempunyai rasa ketidaksukaan terhadap Pemerintahan Filipina: *pertama*, adanya rasa takut memiliki agama, budaya dan tradisi melemah karena adanya paksaan dari Pemerintah Filipina untuk asimilasi (penyesuaian) Agama Katolik. *Kedua*, kebencian karena adanya perpindahan penduduk Katolik dari utara ke selatan Filipina, yang menyebabkan berkurangnya populasi orang-orang Islam. Sehingga menjadi minoritas di tanah mereka sendiri. *Ketiga*, berontak dengan berkurangnya pembangunan ekonomi di Mindanao, yang menyebabkan masyarakat Filipina Selatan menjadi propinsi termiskin. *Keempat*, terdapat tradisi darah permusuhan.[12]

Pentingnya dalam penelitian ini, penulis menekankan pada konflik yang terjadi di Filipina Selatan. Apabila dilihat dari segi historis konflik tersebut berawal dari penjajah yang datang di Negara Filipina terutama di Filipina Selatan, kemudian Pemerintah Filipina melanjutkan kebijakan yang dilakukan

---

[11]Erni Budiwanti, "*Gerakan Pembebasan Moro dan Perjanjian Damai*," dalam *Multikulturalisme, Separatisme dan Pembentukan Negara Bangsa di Philipina*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2003), 91.

[12]Angel Rabasa and Peter Chalk, *Indonesia's Transformation and The Stability of Southeast Asia* (Santa Monica: RAND, 2001), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh penjajah. Setelah itu terjadilah konflik internal antara Pemerintah Filipina dengan etnis masyarakat Muslim Moro yang ada di Filipina Selatan. Pada akhirnya berdirilah gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri, karena dari pihak Pemerintah Filipina melakukan penekanan-penekanan terhadap masyarakat Muslim Moro. Sehingga melihat dari konflik tersebut, Pemerintah Filipina dengan masyarakat Muslim Moro yang diwakili oleh gerakan MNLF melakukan negosiasi-negosiasi atau perundingan-perundingan, guna untuk menyelesaikan konflik. Tujuan dalam penelitian skripsi ini untuk menemukan faktor-faktor terjadinya konflik dan usaha-usaha perdamaian dalam penyelesaian konflik.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari diskripsi singkat pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dan mengacu pada judul penelitian, maka penulis menetapkan yang menjadi masalah dari skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana terjadinya konflik antara Pemerintah Filipina dengan masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan?
2. Bagaimana munculnya kelompok-kelompok perlawanan masyarakat Muslim Moro terhadap Pemerintah Filipina ?
3. Bagaimana proses penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dengan masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya konflik antara Pemerintah Filipina dengan masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan
2. Untuk mengetahui munculnya kelompok-kelompok perlawanan masyarakat Muslim Moro terhadap Pemerintah Filipina.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dengan masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan

## D. Kegunaan Penelitian

1. untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Sebagai bahan kajian atau masukkan mata kuliah bagi para mahasiswa yang mendalami bidang studi sejarah yang berkaitan dengan sejarah minoritas Islam di Asia Tenggara.
3. Sebagai tambahan wawasan, referensi dan kajian selanjutnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu sejarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik

Untuk memperjelas dan mempermudah dalam proses pembuatan Skripsi yang berjudul "**Minoritas Islam Di Filipina (Kajian Sejarah Konflik Antara Pemerintah Filipina dan Masyarakat Muslim Moro Pada Tahun 1960-1996)**", penulis akan menggunakan pendekatan diakronis dan sinkronis. Pendekatan diakronis digunakan penulis untuk mengetahui sejarah atau kronologi. Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan sejarah perkembangan yang berada di Filipina Selatan. Sedangkan pendekatan sinkronis merupakan pendekatan yang menggunakan ilmu bantu sosial, terutama politik dan antropologi untuk mengetahui sejarah sosial, yang berhubungan dengan konflik-konflik sosial sesuai dengan judul skripsi ini.

Kemudian landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori konflik. Karena dalam skripsi ini penulis membahas tentang gerakan-gerakan perlawanan yang ada di Filipina Selatan.

Sebelum melangkah ke teori konflik, akan dipaparkan tentang pengertian konflik. Konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu "*con*" yang artinya bersama, dan "*fligere*" yang artinya benturan atau tabrakan. Dengan demikian, arti dari konflik dalam kehidupan sosial yaitu benturan kepentingan, keinginan, pendapat dan lain-lain yang melibatkan dua pihak atau lebih. Secara sederhana konflik dapat diartikan sebagai suatu perselisihan atau persengketaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara dua atau lebih kekuatan baik secara individu ataupun secara kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan atau menyingkirkan.[13]

Teori yang digunakan dalam skripsi ini ada teori "*Post-Colonial*". Menurut Benita Parry, teori poskolonial yaitu "permusuhan yang tak terhindarkan antara pribumi dan pendatang".[14] Maksud dari teori tersebut adalah suatu kejadian yang disebabkan adanya faktor sejarah yang dipengaruhi oleh para penjajah. Dampak dari kejadian tersebut dirasakan oleh negara-negara bekas jajahan para kolonial, terutama kaum pribumi yang berakibat adanya konflik atau permusuhan.

Kemudian teori yang ditekankan oleh Luc van de Goor, Kumar Rupesinghe dan Paul Sciarone tentang teori "*Conflict in Post-colonial*" tentang suatu konflik yang dipengaruhi oleh para penjajah yang datang yang mempunyai tujuan tertentu dan pengaruhnya masih diberlakukan.[15]

Sebelum mengarah ke teori pascakolonial, penulis akan memaparkan definisi pascakolonial. Pascakolonial terdiri dari dua kata yaitu *pasca* dan *kolonial*. *Pasca* artinya sesudah, dan kolonial berasal dari kata latin yaitu *colonia* artinya pemukiman. Menurut istilah, kolonial artinya penguasaan tanah dan harta

---

[13]Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Social: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), 347-348.

[14] Leela Gandhi, *Teori Poskolonial Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat* (Yogyakarta: Qalam, 2001), 15.

[15]Aleksius Jemadu, *Poitik Global dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh penduduk pendatang terhadap penduduk asli pribumi. Teori yang digunakan penulis adalah *teori Pascakolonisme* menurut Ania Loomba dalam bukunya yang berjudul *Colonialism/PostColonialism* menyatakan, "Negara bangsa yang baru merdeka hanya membagikan buah buah secara selektif dan timpang kepada rakyat. Digulingkannya pemerintahan koloni tidak secara otomatis membawa perubahan ke arah perbaikan status perempuan, kelas pekerja, atau petani di kebanyakan negara jajahan,"[16] Maksud dari teori tersebut adalah kolonial tidak hanya menguasai bangsa-bangsa pribumi saja, akan tetapi sistem pemerintahan yang lama ditiru dan digunakan sebagai sistem pemerintahan baru. Sistem pemerintahan yang baru tidak membawa dampak positif bagi rakyat umum. Dengan demikian, Pemerintah Filipina dalam pengaturan dan kebijakan negara masih mengunakan kebijakan-kebijakan yang digunakan para kolonial Spanyol dan Amerika Serikat. Akibat dari kebijakan tersebut akan merugikan masyarakat Muslim Moro yang berada di Mindanao dan Sulu. Maka dari itu, terjadilah konflik internal antara Pemerintah Filipina dengan masyarakat Muslim Moro yang berada di Mindanao Filipina Selatan, karena faktor sejarah pada masa kolonial.

Selain itu, penulis juga menggunakan teorinya Michael Brown tentang *Nationalism and Ethnic Conflict*. Menurutnya terdapat 2 faktor akibat terjadinya

---

[16] Mudji Sutrisno dan Hendra Putranto, *Hermeneutika Pascakolonial Soal Identitas* (Yogyakarta: Kansius,2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konflik yaitu faktor struktural dan faktor politik.[17] Faktor stuktural menekankan pada *weak state* (lemahnya negara), keamanan dalam negeri dan etnisitas suatu wilayah. Apabila dihubungkan dengan konflik Filipina yaitu etnisitas (kesukuan) yang bertempat di wilayah Mindanao yaitu penduduk asli yang mempunyai budaya ketimuran. Sedangkan Filipina bagian utara membawa budaya barat. Faktor politik bisa dilihat dari pemicu ketegangan antar etnis. Ketegangan etnis berkaitan dengan sistem politik, ideologi politik yang berlaku, dinamika politik antar kelompok dan perilaku elit. Apabila dihubungkan dengan Filipina Selatan, yaitu masyarakat Muslim Moro sering melakukan pemberontakan karena kalangan elit tidak memihak kepada kepentingan masyarakat Muslim Moro buktinya muncul gerakan-gerakan radikal seperti MNLF, MILF, dan kelompok Abu Sayaf.

Upaya-upaya dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan cara Konsiliasi. Konsiliasi berasal dari kata Latin *Conciliatio* atau perdamaian yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ke tiga. Dalam pembahasan skripsi ini juga mengungkap negosiasi-negosiasi dan resolusi-resolusi damai, yang mempertemukan Pemerintah Filipina dengan Muslim Moro yang diwakili oleh

[17] Nasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 200), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan MNLF (*Moro National Liberation Front*). Perundingan-perundingan tersebut dimediatori oleh OKI (*Organisasi Konferensi Islam*).

## F. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa buku yang meneliti tentang masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan, antara lain yaitu:

1. *Dinamika Islam Filipina*, karya Cesar A. Majul. Buku ini membahas tentang identitas dari kelompok-kelompok Islam masyarakat Muslim Moro yang berada di tengah-tengah orang-orang non-Muslim. Buku ini juga membahas suatu permasalahan yang tidak hanya muncul dari pihak kuasa saja, akan tetapi juga dari golongan penentang Muslim yang selalu dirugikan prinsip-prinsip pemerintah diterapkan di Negara Filipina, terutama di Filipina Selatan.[18]
2. *Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal*, karya Syahbuddin Mangandaralam. Buku ini membahas sejarah singkat, sistem pemerintahan yang diterapkan, perkembangan perekonomian di Negara Filipina, dan Bangsa Moro berjuang untuk sebuah Negara sendiri.[19]
3. *The Secret of Jihad Moro: Fakta-Fakta Perlawanan Kaum Tertindas Muslim Moro*, karya Abu Ibrahim Muhammad Daud. Buku ini membahas perjuangan Bangsa Moro melawan para penjajah dan menceritakan dengan gamblang

---

[18] Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina*, Terj. Eddy Zainurry (Jakarta: LP3ES, 1989).

[19] Syahbuddin Mangandaralam, *Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kamp Abu Bakar Ash-Shiddiq beserta isinya. Buku ini juga membahas pemimpin gerakan dari MILF yang memisahkan diri dari gerakan MNLF dan mengungkap kisah-kisah pemimpin Moro yang telah meninggal.[20]

Dari beberapa buku yang dipaparkan di atas, maka dari itu dalam skripsi ini penulis akan mefokuskan pembahasan tentang *Kajian sejarah Konflik Antara Pemerintah Filipina dan Masyarakat Muslim Moro pada Tahun 1960-1996.* Fokus dari skripsi ini yang berbeda dari penelitian-penelitian yang terdahulu yaitu skripsi ini menekankan terhadap sejarah konflik yang terjadi Filipina Selatan dan resolusi-resolusi damai yang dicapai pemerintah Filipina dengan masyarakat Muslim Bangsa Moro, guna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Filipina Selatan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah atau disebut juga dengan metode sejarah, artinya jalan, cara, atau petunjuk teknis dalam melakukan proses penelitian. Metode sejarah dalam pengertian umum adalah suatu suatu penyelidikan suatu permasalahan dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari pandangan historis.[21] Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian sejarah terdapat empat langkah, yaitu *Heuristik* (pengumpulan sumber), *Verifikasi*

---

[20] Abu Ibrahim Muhammad Daud, *The Secret of Jihad Moro: Fakta-Fakta Perlawanan Kaum Tertindas Moro* (Solo: media ISLAMIKA, 2008)

[21] Dudung Abdurahman, *Metodelogi Penelitian Sejarah*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kritik), *Interpretasi* (penafsiran atau analisis), dan *Historiografi* (penulisan sejarah). Melalui penelitian sejarah penulis berusaha menjelaskan tentang sejarah minoritas yang berada di Filipina Selatan yang mengkaji sejarah dan konflik-konflik antara pemerintah Filipina dan masyarakat Muslim Moro. Tahapan-tahapan metode penelitian sejarah akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Heuristik* (Pengumpulan Sumber). Tahap ini penulis akan melakukan penelitian literatur dalam pengumpulan sumber dalam penulisan karya ilmiah ini. Proses dalam melakukan pencarian sumber-sumber melalui buku-buku, majalah, jurnal, artikel, dan makalah. Sumber-sumber tersebut termasuk sumber sekunder karena sumber yang disampaikan bukan saksi mata.[22] Akan tetapi, dalam karya ini penulis menemukan sumber primer yang ada dalam bukunya Cesar A. Majul yang berjudul *Dinamika islam Filipina*, sumber tersebut berupa arsip-arsip laporan Pemerintah Filipina dan gerakan MNLF di Filipina Selatan tentang situasi kaum Muslim di Filipina Selatan.
2. *Verifikasi* (Kritik Sumber). Pada tahap ini penulis akan melakukan mengujian terhadap sumber-sumber yang terkumpul. Untuk mengetahui autentisitas dan kredibelitas sumber. Penulis mengunakan kritik intern dan ekstern.[23] Untuk kritik intern sumber-sumber yang terkumpul dari buku-buku yang ditemukan, penulis melihat dan menemukan arsip-arsip Pemerintah Filipina dan organisasi Islam yang terlampir di bagian lampiran buku di bagian belakang.

---

[22] Ibid., 65.
[23] Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kritik intern ini untuk memperkuat sumber atau fakta. Sedangkan kritik ekstern penulis lakukan dengan cara melihat sumber-sumber dari buku-buku yang terkumpul yang dilihat dari kota terbit, pengarang dan sumber-sumber yang digunakan oleh pengarang dalam penyusunan buku-buku tersebut.

3. *Interpretasi* (Penafsiran). Pada tahap ini penulis melakukan penafsiran yang menggunakan dua metode. Metode yang digunakan adalah analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan).[24] Dalam menafsirkan suatu permasalahan sejarah penulis akan menggunakan analisis dan sintesa, karena keduanya sangat penting dalam mengupas fakta-fakta sejarah dari sumber-sumber yang ada.
4. *Historiografi* (Penulisan Sejarah). Tahap ini merupakan bentuk penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai penelitian sejarah yang menekankan aspek kronologis.

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam karya ilmiah ini penulis membagi atas beberapa bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, untuk sistematika pembahasan penulis akan menggambarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan

[24]Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka (Bibliografi).

BAB II : Konflik antara Pemerintah Filipina dengan masyarakat Moro di Filipina Selatan, yang terdiri dari dua sub bab yaitu latar belakang terjadinya konflik dan perkembangan konflik mulai pemerintahan Marcos sampai Aquino.

BAB III : Gerakan-gerakan perlawanan Muslim Moro di Filipina Selatan , yang terdiri dari dua sub bab yaitu munculnya gerakan-gerakan perlawanan di Filipina Selatan dan berdirinya gerakan-gerakan Islam di Filipina Selatan.

BAB IV: Penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Muslim Moro di Filipina Selatan, yang terdiri dari empat sub bab yaitu urgensi penyelesaian konflik, Perjanjian Tripoli tahun 1976, resolusi kongres Islam Filipina tahun 1981, dan Perjanjian Damai tahun 1996.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONFLIK ANTARA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN MASYARAKAT MUSLIM MORO DI FILIPINA SELATAN

## A. Latar Belakang Terjadinya Konflik

Suku Moro merupakan suku Muslim mayoritas yang berada di wilayah Mindanao, salah satu pulau yang berada di Filipina Selatan. Suku Moro merupakan suku mayoritas di Mindanao, akan tetapi suku tersebut menjadi suku minoritas di Negara Filipina. Oleh karena itu, masyarakat Muslim Moro sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pemerintah Filipina yang beragama Kristen, karena pemerintah Filipina menginginkan seluruh Filipina menjadi beragama Kristen terutama di wilayah Mindanao bagian Filipina Selatan.

Dilihat dari sudut historis, konflik antara masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan dengan pemerintah Filipina berasal dari sejarah para penjajah yang datang di Filipina. Penjajah yang pernah datang ke Filipina yakni Spanyol dan Amerika serikat, tujuan dari penjajah tersebut yaitu ingin mengadakan kristensasi terhadap orang-orang Islam terutama pada orang-orang pribumi yang berada di Filipina.

Akan tetapi, cara yang dilakukan para penjajah dalam menguasai Negara Filipina terutama di bagian Filipina Selatan wilayah Mindanao dan Sulu yakni berbeda-beda. Seperti penjajah dari Spanyol, cara yang dilakukan penjajah Spanyol dalam menguasai Negara Filipina terutama bagian Filipina Selatan yakni dengan cara



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan, bukti adanya *Perang Moro* yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dari Spanyol dengan orang-orang Islam Filipina Selatan. Sedangkan yang dilakukan penjajah Amerika Serikat yakni dengan cara kerjasama yang dijalin dengan orang-orang Islam, akhirnya penjajah Amerika melakukan migrasi orang-orang Kristen ke wilayah orang-orang Islam yang berada di mindanao dan Sulu yang berada di Filipina Selatan.

Penaklukkan dan usaha kristensasi yang dilakukan penjajah Spanyol sukses dibagian utara Filipina pada abad ke-16, akan tetapi Spanyol tidak berhasil melakukan kristensasi kepada orang-orang Islam di wilayah bagian selatan Filipina, karena Muslim Moro di wilayah bagian selatan Filipina tetap melakukan perlawanan terus menerus terhadap penjajah Spanyol. Pada akhirnya Spanyol kewalahan dan kemudian digantikan oleh penjajah dari Amerika Serikat.[25]

Penjajah Amerika masuk ke Filipina pada abad ke-19, politik yang digunakan oleh Amerika untuk menguasai Filipina yaitu politik *devide et impera*. Amerika berhasil melakukan politik tersebut dengan cara memasukkan orang-orang Kristen yang ada di bagian utara Filipina yang pada waktu itu utara Filipina di perintah oleh Amerika ke Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu. Secara ekonomi kondisi Muslim Moro jauh ketinggalan dari penduduk Kristen di utara Filipina. Muslim Moro juga tidak ingin mengikuti sistem pendidikan Amerika, akan tetapi ada sebagian penduduk

---

[25] Syahbuddin Mangandaralam, *Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslim yang berhasil dirayu untuk mengikuti sistem pendidikan Amerika yaitu Muslim dari kalangan bangsawan yang tidak ingin kehilangan kedudukan mereka dari sistem penjajahan.[26] Dari kalangan bangsawan inilah yang menyatuh dengan penduduk mayoritas Kristen secara sosial, ekonomi dan politik. Kalangan bangsawan dan penduduk Kristen merupakan kalangan kelompok elit yang termasuk penguasa, pada masa penjajah Amerika maupun pada masa setelah kemerdekaan Filipina pada tanggal 4 Juli 1946.

Setelah mengalami kemerdekaan Pemerintah Filipina meneruskan kebijakan yang dilakukan oleh penjajah Amerika, yakni pembukaan daerah-daerah pemukiman baru di wilayah menduduk Muslim Moro dan pemindahan orang-orang Kristen dari Filipina Utara ke wilayahnya orang-orang Islam di Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu bagian Filipina Selatan secara terus menerus. Akhirnya wilayah yang dulu mayoritas Islam sekarang menjadi minoritas. Selain itu, Pemerintah Filipina juga memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan nasional dan asing untuk membuka perkebunan-perkebunan besar di wilayah selatan Filipina.

Pemerintah Filipina dengan diam-diam mendorong dan mendukung kelompok kriminal yang membunuh Muslim Moro dan membakar desa-desa yang mereka tempati. Kemudian Pemerintah Filipina mengambil tanah-tanah mereka untuk pemukiman orang-orang Kristen yang datang dari utara Filipina. Gereja Katolik tetap

---

[26] Ibid, 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai kekuatan penggerak dalam melakukan kegiatan Kristensasi terhadap orang-orang Islam di selatan Filipina.[27]

Konflik merupakan sebuah ketetapan logis dari sebuah interaksi di antara dua belah pihak. Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan konflik, yakni diantaranya masalah ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan terhadap pihak tertentu, yang meliputi ketimpangan sosial, ekonomi, budaya dan agama. Begitu juga dengan gerakan separatisme merupakan konflik yang sering terjadi di dalam suatu negara. Adapun penyebab terjadinya gerakan separatisme adalah adanya kesenjangan sosial politik antara pemerintah pusat dengan wilayah yang bersangkutan. Kesenjangan sosial yang dimaksud bisa dikarenakan adanya perbedaan situasi ekonomi, pendidikan, dan perlakuan HAM. Gerakan separatisme ini biasanya terjadi di negara yang sedang berkembang yang sistem politiknya sering atau sedang mengalami transisi dan cenderung tidak stabil.

Pada tahun 1960 terjadi pemberontakan bersenjata Muslim Moro, yang mengakibatkan munculnya sebuah gerakan perlawanan yang terorganisir. Reaksi Separatis Moro terhadap marginalisasi yang dilakukan oleh kolonial Spanyol yang berturut-turut, Amerika, dan pemerintah Filipina pusat. Permasalahan ini mengenai tanah Bangsa Moro yang berasal dari nenek moyangnya yang dirampas oleh kolonialisme. Kebijakan imigrasi yang dilakukan oleh pemukim Kristen yang datang ke tanah mereka. Terdapat pernyataan bahwa Bangsa Moro tidak pernah ditaklukkan

---

[27]Ali M. Kettani, Ali M. *Muslim Minorities In The World Today/ Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Penerjemah: Zarkowi soejoeti (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kolonial Spanyol maupun Amerika. Akan tetapi tanah air mereka telah dirampas dengan jalan kekerasaan secara tidak adil setelah Manila mengalami kemerdekaan. Pernyataan ini juga tidak sepenuhnya benar, karena telah diketahui bahwa pada tahun 1878, Sultan Jama ul-Azam Sulu menandatangani perjanjian perdamaian dengan pemerintah Spanyol yang menyetujui untuk merangkul rakyatnya agar patuh kepada raja Spanyol dengan imbalan otonomi. Demikian juga dengan Datu Utto Cotabato menyerah ke Spanyol pada tahun 1887 dan mengakui kekuasaan raja Spanyol. Pada tahun 1898 Mindanao sendiri dijajah oleh Amerika Serikat, apabila pada waktu itu Spanyol bertahan maka Mindanao akan ditaklukan oleh kolonial Spanyol.[28]

Apabila dihubungkan dengan teori *pascakolonial* yaitu menyatakan, "Negara bangsa yang baru merdeka hanya membagikan buah secara selektif dan timpang kepada rakyat. Digulingkannya pemerintahan koloni tidak secara otomatis membawa perubahan ke arah perbaikan status perempuan, kelas pekerja, atau petani di kebanyakan Negara jajahan."[29] Apabila dihubungkan dengan paparan di atas, meskipun dalam masa pemerintahan Spanyol telah melakukan perjanjian perdamaian dengan Sultan Jama ul-Azam Sulu pada tahun 1878, dari adanya pedamainan tersebut tidak membawa dampak positif karena rakyat akan dirangkul dan dikuasai oleh Spanyol, dan dari perjanjian tersebut Spanyol masih menginginkan suatu imbalan

---

[28]Joseph Chinyang Liow, *Muslim Resistence in Southern Thailand and Southtern Philippiness: Religion, Ideology, and Politics* (Washington: East-West Center,2006), 8-9.

[29] Mudji Sutrisno dan Hendra Putranto, *Hermeneutika Pascakolonial Soal Identitas*, (Yogyakarta: Kansius,2004), hal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otonom. Dampak tersebut sangat berpengaruh terhadap Muslim Moro yang berada di Mindanao dan Sulu.

Dari paparan di atas apabila penulis meneliti dari referensi yang lain bahwa Spanyol tidak pernah melakukan marginalisasi tanah Bangsa Moro, karena kolonial Spanyol sadar bahwa tanah tersebut bukan haknya, akan tetapi kolonial Spanyol melakukan peperangan yang dinamakan *Perang Moro* yang bertujuan untuk membaratkan orang-orang Filipina terutama orang-orang Islam di Pulau Mindanao dan Sulu yang terletak di Filipina Selatan.

Perlawanan Bangsa Moro muncul berawal dari kolonialisme yang datang di Filipina, khususnya di Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu. Kolonialisme yang datang di Filipina yaitu Spanyol dan Amerika Serikat. Konflik yang dilakukan kolonial Spanyol yakni tejadinya peperangan yang panjang yang disebut dengan "Perang Moro". Perang Moro tersebut mengakibatkan ketegangan antara orang-orang Kristen dengan orang-orang Islam di Filipina, pada akhirnya memunculkan rasa kebencian yang timbul dikalangan orang-orang Islam.

Setelah itu Spanyol dikalahkan oleh Amerika dalam perjanjian yang dinamakan "Treaty of Paris" yang diresmikan pada tanggal 10 Desember 1898. Kemudian Amerika mengadakan penyatuan Bagsa Moro ke dalam etnik Filipino yang mayoritas Kristen, penyatuan tersebut diresmikan pada tanggal 1 September 1914. Peresmian tersebut mengakibatkan berlakunya hukum Filipina terhadap Bangsa Moro dan dihapusnya kesultanan yang berdiri sendiri. Akhirnya Amerika mengontrol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah milik Bangsa Moro di Mindanao, setelah itu Amerika mengeluarkan kebijakan tentang memindahkan dan menempatkan orang-orang Kristen dari utara dan tengah Filipina ke wilayah Mindanao mayoritas Islam di selatan Filipina. Secara demografik dari kebijakan Amerika tersebut adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di utara dan tengah Filipina dan menjadikan Bangsa Moro menjadi etnik minoritas di tanah kelahirannya sendiri.[30]

Selain itu, kebijakan resmi Amerika yakni tentang membiarkan kehidupan agama orang-orang Islam dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ritual orang-orang Islam, para pejabat Amerika kurang menghargai sistem tradisional *datu* (*datu* adalah penguasa lokal yang mempunyai kekuasaan eksekutif dan militer), mereka juga tidak pernah berupaya untuk menghapuskan, tetapi para penjabat Amerika menindas para *datu-datu* yang keras kepala. Meskipun para pejabat Amerika melakukan penindasan kepada para *datu-datu* yang keras kepala, akan tetapi mereka masih mempertahankan hubungan persahabatan dengan para *datu*. Akibatnya lembaga-lembaga politik dan teknik-teknik baru diperkenalkan oleh Amerika kepada orang-orang Kristen di daerah-daerah mereka.[31]

sedangkan lembaga politik dan teknik baru tersebut tidak diperkenalkan dan dipelihara oleh orang-orang Islam. Maka dari itu, orang-orang Amerika dengan

---

[30]Erni budiwanti,"Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina Gerakan Separatism Moro" dalam *Prosiding Seminar Refleksi Aktur Tahun 2003 Keduptan Bidang IPSK*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2004), 81-82.

[31] Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina*, Terj. Eddy Zainurry (Jakarta: LP3ES, 1989), 15-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah melakukan komunikasi dengan orang-orang Kristen, kemudian orang-orang Kisten menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen mendapatkan posisi terpilih dalam pemerintah sedang orang-orang Islam tidak mendapatkan karena kurang adanya rasa partisipasi terhadap sistem baru dari diri orang-orang Islam. Dengan demikian, pada tahun 1920 ketika daerah-daerah Islam jatuh ke tangan penguasa Kristen, kemerdekaan orang-oramg Islam yang diberikan oleh Amerika disesuaikan dengan orang-orang Kristen. Pada tahun 1921 para *Datu* dan pemimpin Sulu menginginkan memilih pemerintah di bawah protektoriat Amerika dan pada akhirnya disetujui oleh Kongres Amerika, bertujuan untuk menundukkan orang-orang Kristen Filipina.[32]

Masuknya kolonial Spanyol dan Amerika sangat mempengaruhi pemikiran pemerintahan baru di Filipina. Pemerintah persemakmuran Filipina didirikan pada tahun 1935, pada waktu itu di bawah kekuasaan presiden Manuel Quezon. Manuel Quezon sebagai presiden menyatakan bahwa dalam pemerintahan baru tidak ada tempat bagi sultan-sultan dan *datu-datu* dan menerapkan undang-undang yang sama yang harus diberlakukan oleh orang-orang Islam dan orang-orang Kristen. Undang-undang yang diambil oleh presiden yakni dari etika Kristen dan sejarah sosial Barat. Oleh sebab itu, undang-undang yang diberlakukan bagi orang Islam Filipina terasa asing. Secara langsung sikap Quezon telah mengabaikan sistem-sistem sosial, hukum tradisional Islam dan menghasut kebencian di kalangan pemimpin Islam. Maka dari itu, masyarakat merasakan kebencian dan pada akhirnya terjadilah peperangan

[32]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang. Orang-orang Islam juga membenci sistem pendidikan Barat, karena aturan-aturan prilaku didasarkan pada nilai-nilai Barat, seperti dalam karya-karya sejarah yang mengajarkan bahwa orang-orang Islam telah memerangi orang-orang Spanyol sebagai perampok dan pedagang budak.[33] Maka dari itu, orang-orang Islam tidak bersemangat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum karena terdapat nilai-nilai barat.

Seperti dalam pidatonya Nur Misuari tentang pemusnahan kebudayaan di Filipina yang ditujukan kepada penjajah Filipina yang berada di tanah air masyarakat Muslim Moro yaitu :

> "dengan mengambil keuntungan dari kekacauan total dan trauma di masa setelah berakhirnya perang, pemerintah imperialis Amerika, dalam keputusannya untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Filipina, bersekongkol dengan orang-orang Filipina yang menjadi boneka-bonekanya untuk dengan cara yang sewenang-wenang menempatkan rakyat kami di bawah kekuasaan dan dominasi koilonial Filipina.
>
> Peristiwa yang sangat penting itu terjadi pada tanggal 4 Juli 1946, sekitar 30 tahun yang lalu. Sebelum itu, rakyat kami belum pernah merupakan bagian Negara Filipina. Mereka hidup terpisah – bebas dan berdaulat. Bahkan ketika gagasan untuk menyatukan rakyat kami dikemukakan untuk pertama kalinya oleh pemerintah colonial Amerika dalam tahun-tahun 1930-an, rakyat kami menentang dengan sengit rencana yang sangat jahat itu: buktinya adanya manifesto rakyat Bangsa Moro tanggal 18 Maret 1935 yang sangat terkenal itu, yang ditujukan kepada Kongres AS dan Presiden AS.
>
> Adalah tepat jika dikatakan bahwa perang yang sekarang sedang berkobar di Filipina Selatan juga menimpa, atau pernah menimpa, semua rakyat terjajah di dunia, apakah itu di Afrika, Amerika Latin atau Asia.
>
> Pada waktu yang bersamaan, sebagai reaksi terhadap rezim pemerasan kolonial, penindasan dan tirani itu, rakyat jajahan yang tertindas tak terelakkan lagi terseret ke dalam bentrokkan yang sengit dengan penjajah mereka, dan dengan demikian mempercepat perkembangan proses revolusioner dan kesadaran revolusioner rakyat jajahan yang tertindas, yang pada suatu tahap tertentu akan mencetuskan enersi dan dinamisme revolusioner mereka.
>
> Demikian halnya dengan kelahiran revolusi Bangsa Moro yang dipimpin oleh Front Pembebasan Nasional Moro".[34]

---

[33] Ibid., 18-19.

[34]Dikutip dari Mahardika,Vol. IX, No. 1, 1982. Dalam bukunya Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina* yang terletak pada lampiran II. 152-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, seperti yang telah dipaparkan di atas, para pemimpin Islam mempunyai keyakinan bahwa peraturan pemerintah yang baru dan sistem pendidikan yang diterapkan merupakan rencana jahat untuk menjatuhkan Islam di Filipina terutama di bagian selatan Filipina wilayah Mindanao dan Sulu.

Salah satu penyebab konflik yang timbul dari Amerika Serikat, yakni Amerika berhasil memasukkan orang-orang Kristen ke Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu yang mayoritas beragama Islam. Dari peristiwa tersebut Amerika menggunakan politik *devite et impera*. Dilihat dari sisi lain Amerika juga melakukan peperangan tapi tidak menggunakan pertumpahan darah, akan tetapi peperangannya secara sosial, ekonomi, pendidikan.

Di sisi lain, tidak semua orang Islam menolak dari pendidikan Amerika, sebagian penduduk Muslim berhasil dibujuk untuk mengikuti dan menjalankan sistem pendidikan Amerika. Orang-orang Islam yang mengikuti sistem pendidikan Amerika yaitu dari kalangan bangsawan, karena mereka tidak ingin kehilangan jabatan dari penjajah. Secara politik dan sosial-ekonomi mereka yang menyatuh dengan penduduk mayoritas Kristen. Para bangsawan merupakan kelompok elit yang masuk pada jaringan penguasa. Hal tersebut terjadi pada masa kolonial Amerika maupun pada masa Filipina mangalami kemerdekaan pada tahun 1946.[35]

Secara demografi jumlah penduduk di utara dan tengah Filipina mengalami penurunan penduduk karena penduduknya berimigrasi ke bagian selatan Filipina

---

[35]Syahbuddin Mangandaralam, *Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mayoritas Islam, yang mengakibatkan penduduk Muslim Moro menjadi minoritas di tanah airnya sendiri. Setelah 50 tahun kebijakan migrasi diterapkan, penduduk Kristen Filipino pendatang berkembang menjadi tiga kali lipat. Pada tahun 1918, jumlah pendatang Kristen hanya 22% (160 ribu orang) dari 720 ribu penduduk Mindanao. Pada tahun 1980, jumlah penduduk Kristen Filipino meningkat menjadi 65% (7 juta orang lebih) dari 11 juta penduduk Mindanao. Sedangkan jumlah penduduk Muslim Moro pada tahun 1918 yaitu 46% (359.000), kemudian pada tahun 1980 penduduk Muslim Moro menjadi12% (2 juta orang) dari 11 juta penduduk Mindanao.[36]

## B. Perkembangan Konflik Mulai Pemerintahan Marcos sampai Aquino

### 1. Konflik pada Masa Pemerintahan Marcos

Bangsa Moro di jajah oleh kolonial Filipina pada tahun 1940 dan sejak tahun itu tidak ada perubahan bagi Bangsa Moro, meskipun telah memperoleh kemerdekaan dari Amerika. Pemerintah Filipina meneruskan kebijakan dari kolonial Spanyol yakni pembunuhan orang-orang Muslim Bangsa Moro yang didukung oleh kolonial Amerika Serikat. Pada tahun 1915 Amerika menyempurnakan penduduk bangsa Moro dengan cara membuka imigrasi orang-orang Kristen dari utara, pada awalnya imigrasi tersebut berjalan dengan lambat, kemudian setelah tahun 1939 imigrasi tersebut mengalami perkembangan yang pesat sampai terjadi kekhawatiran perimbangan.

[36] Erni buduwanti,"*Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina Gerakan Separatism Moro*" dalam *Prosiding Seminar*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan imigrasi tersebut lebih didorong oleh pemerintah Filipina yang merdeka. Pemerintah Filipina juga mendorong dan diam-diam mendukung kelompok kriminal yang membunuh orang-orang Muslim Bangsa Moro, membakar desa-desa mereka dan mengambil tanah-tanah kosong mereka digunakan untuk pemukiman orang-orang Kristen.[37]

UU kepemilikan tanah yang dibuat oleh pemerintah Filipina tidak hanya menciptakan perubahan terhadap komposisi penduduk Bangsa Moro, akan tetapi merubah struktur kepemilikan tanah sekaligus status social. Hal tersebut merupakan awal dari munculnya konflik horizontal. Melalui *land acts* (undang-undang tanah), pemerintah berperan dominan dalam menciptakan konflik antara orang-orang Kristen dan Bangsa Moro yang kemudian berkembang menjadi konflik vertikal ketika kesadaran Bangsa Moro bergolak dalam berbagai gerakan-gerakan separatis yang menuntut *self-determination.*[38]

Paparan tersebut menjelaskan tentang konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan Bangsa Moro berawal dari konflik horizontal. Konflik horizontal adalah suatu konflik hubungan interaksi antara kelas sosial atau kelompok sosial yang sengaja menciptakan sebuah konflik dan adanya dukungan untuk mewujudkan suatu kondisi atau keadaan yang dikehendaki.

---

[37] Ali M. Kettani, Ali M. *Muslim Minorities In The World Today/ Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini.* Penerjemah: Zarkowi soejoeti (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 196-197.

[38]Erni buduwanti,"Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina Gerakan Separatism Moro" dalam *Prosiding Seminar*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konflik horizontal apabila dihubungkan dengan konflik di Filipina yakni berawal dari adanya imigrasi orang-orang Kristen ke daerah orang-orang Islam di Mindanao bagian Filipina Selatan, kemudian dari peristiwa tersebut dapat dukungan dari pemerintah Filipina yakni dengan adanya pembentukan undang-undang kepemilikan tanah untuk para orang-orang Kristen yang tinggal di tanah-tanah orang-orang Islam, akhirnya Islam di tempat tinggalnya sendiri menjadi minoritas karena kedatangan orang-orang Kristen dari utara Filipina. Dampak dari kejadian tersebut tidak hanya merubah penduduk Islam jadi minoritas akan tetapi juga merubah status sosial dalam kepemilikan tanah.

Konflik horizontal berkembang menjadi konflik vertikal, konflik vertikal adalah suatu konflik hubungan interaksi antara satu kelas sosial atau kelompok sosial yang berbeda tingkatan akibat adanya pertentangan kepentingan yang difasilitasi atau kelompok sosial yang berbeda di satu pihak dengan satu kelompok di pihak lainnya. Apabila konflik vertikal dihubungkan dengan permasalahan di Filipina yakni karena adanya undang-undang kepemilikan tanah yang mendapat dukungan dari pemerintah Filipina, mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan separatism ang memisahkan diri dari pemerintahan Filipina untuk memperoleh kmerdekaan atas Bangsa Moro di Filipina Selatan. Munculnya gerakan-gerakan separatisme menandakan bahwa adanya kebangkitan Islam di Filipina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ilmuwan Muslim Asiri Abubakar memaparkan tentang beberapa faktor dalam menyumbang kebangkitan Islam di Filipina yaitu *pertama*, bertambah hubungannya dengan ulama' dan pendatang pelajar Muslim dari Arab. *Kedua*, bertambahnya jumlah penduduk Moro yang pergi naik haji. *Ketiga*, bertambahnya kesempatan untuk belajar di pusat Islam. *Keempat*, partisipasi aktif dalam berbagai pertemuan. *Kelima*, kembalinya ratusan Pelajar Muslim dari luar negeri. *Keenam*, semakin banyak didirikannya madrasah sekolah agama di daerah-daerah. *Ketujuh*, kedatangan pejabat dari dunia Islam ke Filipina Selatan. *Kedelapan*, berbagai konferensi pers internasional yang meliput dari peperangan yang ssdang berlangsung di Mindanao dan kekejaman yang dilakukan oleh beberapa personil militer pemerintah Filipina. Sedangkan penyumbang lain dari kebangkitan Islam di Filipina yakni bertambahnya perkumpulan dan organisasi Islam yang didukung oleh warga lokal maupun luar negeri, didirikan sekolah-sekolah tinggi dan universitas-universitas swasta dan negeri yang memasukkan studi Islam di dalamnya, dan pemberontakan Moro yang mengakibatkan peningkatan kesadaran dan kewaspada Muslim Moro.[39]

Selama beberapa tahun Muslim Moro di Filipina selatan telah mengeluh karena masuknya agama Katolik dari Filipina Utara, dan mereka melihat dan merasakan menjadi minoritas di tanah kelahirannya sendiri.

---

[39] Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1988), 347-348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu mereka juga merasa bahwa kebutuhan ekonomi mereka diabaikan oleh pemerintah Filipina. Mereka mengalami perampasan tanah dan penguasaan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Filipina Utara yang didukung oleh pemerintah Filipina. Dua provinsi yang mengalami kekerasan Islam tertinggi dari 77 provinsi di Filipina, yakni di Pulau Basilan, 71% orang Muslim akan tetapi 75% tanah yang dimiliki oleh orang-orang Kristen pendatang. Selain itu, banyak Muslim Moro menolak untuk menyatuh ke dalam masyarakat nasional Filipina karena mereka kurang menghormati adat dan lembaga agama yang dimiliki oleh Muslim Moro.[40]

Konflik yang terjadi atas perlakukan orang-orang Kristen terhadap orang-orang Islam tidak hanya perampasan tanah yang dilakukannya, akan tetapi juga melakukan pemerasan kekayaan Bangsa Moro untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Akibatnya terjadi kepincangan situasi sosial dan ekonomi di antara dua kelompok tersebut. Selain dari konflik tersebut diperburuk dengan terjadinya kasua-kasus pembunuhan missal yang dilakukan oleh ILAGA (organisasi para-militer Kristen yang didukung oleh pemerintah Filipina), seperti pembunuhan besar-besaran di Jabidah dan masjid Manili.[41]

---

[40] Fred R. Von Der Mehden, *Radical Islam in Southeast Asia and its Challenge to U.S. Policy* (Rice University: The James A. Baker III Institute, 2005), 19.

[41] Erni Budwanti,"*Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina Gerakan Separatism Moro*" dalam *Prosiding Seminar*, 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1968 terjadi pembunuhan besar-besaran di Jabidah yang dinamakan *Insiden Corregidor*, dari peristiwa tersebut mengakibatkan ketegangan-ketegangan orang-orang Islam dengan pemerintah Filipina. Pada saat itu, Filipina di bawah kekuasaan presiden Marcos, setelah mendengar adanya pembunuhan di Jabidah, maka lawan-lawan politik presiden Mascos melancarkan tuntutan melawan pemerintah dan tentara. Pers juga membicarakan jeritan keadilan bagi orang-orang Islam. Sebelum terjadi pembunuhan tersebut pada tahun 1967, Angkatan Bersenjata Filipina menciptakan misi suatu unsur proyek rahasia yang dinamakan "Merdeka". Kemudian mereka merekrut dan melatih pemuda-pemuda Islam di Sulu, untuk melakukan sabotase (perusakan secara sembunyi-sembunyi), perang rimbah dan taktik-taktik gerilya. Tujuannya dari pemunuhan tersebut tidak pernah dinyatakan kepada publik , akan tetapi tujuannya itu terdapat di rencana rahasia yang di namakan "Merdeka" yan belum terungkapkan. Dampak dari peristiwa pembunuhan besar-besaran di Jabidah yaitu tidak ada pembunuhan setelah kemerdekaan, kecuali di Jabidah yang telah membuat semua golongan Islam baik dari kalangan sekuler maupun agamis, modern maupun tradisional yakni bersikap sama yaitu merasa prihatin akan masa depan mereka yang dihadapinya[42]

*Insiden Corregidor* diumumkan secara besar-besaran melalui media yang mengakibatkan menimbulkan reaksi-reaksi internasional. Tunku Abdul

[42] Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina,* 37-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahman dan Tun Mustapha bin Harun dari Malaysia menyuarakan pendapatnya tentang program latihan untuk orang-orang Islam yang direkrut dan dilatih, itu menandakan ambisi-ambisi Filipina atas Sabah. Akhirnya banyak organisasi-organisasi Islam dan pejabat-pejabat pemerintah luar negeri yang menanyakan motif-motif terjadinya pembunuhan secara besar-besaran terhadap orang-orang Islam, yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata pemerintah Filipina tanpa menggunakan sidang pengadilan.[43]

Peristiwa demi peristiwa telah terjadi kemudian pada 1971 para pemimpin datu dan ulama' di Mindanao mengeluarkan manifesto tentang menutut pemerintah agar segera bertindak untuk menghentikan berbagai aksi kekerasan atas Bangsa Moro. Kemudian pemerintah Manila menanggapi manifesto tersebut sebagai ancaman dari Bangsa Moro. Kemudian pihak pemerintah melakukan aksi balas dendam atas keluarnya manifesto tersebut. Akibatnya terjadi pertempuran antara militer Bangsa Moro dangan militer Filipina yang menyebabkan banyak orang yang meninggal diantara belah pihak.

Pada tahun 1972 terjadi kekerasan terus- menerus terdapat aksi balas dendam antara orang-orang Kristen dengan orang-orang Islam. Pada akhirnya antara orang-orang Kristen dan orang-orang Islam mendorong presiden Marcos supaya memberlakukan undang-undang militer. Pada tahun yang sama setelah berlakunya undang-undang militer, organisasi perlawanan yang

[43] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di Filipina secara terang-terangan menyatakan sebagai gerakan kemerdekaan Bangsa Moro. Pada tahun 1972 juga perkembangan atas perjuangan Bangsa Moro yang dipelopori gerakan-gerakan separatis yakni MNLF, perjuangan tersebut didukung oleh organisasi internasional yakni OKI.

Perlawanan Bangsa Moro yang diwakili oleh gerakan MNLF terhadap militer Filipina semakin memuncak. Pada akhirnya militer Filipina membagi gerakan militernya menjadi dua komando yakni Komando Mindanao Tengah dan Komando Selatan. Tujuan militer Filipina dalam pembagian gerakan militer tersebut yaitu untuk melakukan serangan terhadap Bangsa Moro yang diwakili oleh gerakan separatis MNLF. Pada tahun 1974 Komando Selatan melumpuhkan pemberontakan gerakan MNLF yang berada di Jolo, sedangkan Komando Mindanao Tengah menyerang kekuasaan Islam yang berada di dataran Mindanao yang berpusat di Cotabato.

Pada tahun yang sama gerakan MNLF ingin menyelesaikan konflik dengan pemerintah Filipina yang didukung OKI, pada akhirnya OKI mengeluarkan penyataan perdamaian yang mendesak pemerintah Filipina untuk berunding dengan pimpinan gerakan MNLF untuk mencari pemecahan politik dalam menyelesaikan konflik di antara mereka.

Setelah itu, pada tahun 1975 pemerintah Filipina untuk pertama kalinya melakuan perundingan dengan para pemimpin gerakan MNLF yang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelopori oleh Nur Misuari dan Hashim Salamat. Sebenarnya presiden Marcos sendiri mempunyai rencana *attraction policy* yaitu suatu kebijakan dapat merangkul para pemberontak supaya meletakkan senjata dan berbalik mendukung pemerintah, agar para pemberontak menyerah dengan terhormat. Cara yang dilakukan presiden Marcos dengan cara menawarkan pengampunan hukuman secara resmi bagi para pemimpin MNLF, menawarkan bisnis dan pembangunan perbaikan kesejahteraan sosial serta jabatan-jabatan politisi lainnya.

Presiden Marcos mendesak OKI dalam penyelesaian masalah Muslim Mindanao, salah satunya Marcos mengirim utusan ke negara-negara Timur Tengah terutama Negara Arab, dengan tujuan untuk memperkuat dengan negara-negara Muslim. Akhirnya ada pertemuan lagi antara gerakan MNLF dengan pemerintah Filipina yang memutuskan tentang penetapan otonomi. Otonomi dalam permasalahan ini diartikan sebagai pemerintahan sendiri (*self-government*) dalam kedaulatan nasional Filipina dan penyatuan daerah Filipina. Kemudian pada tanggal 23 Desember 1976 terjadi perundingan antara pemerintah Filipina (GRP) dengan Muslim Moro (MNLF) yang menghasilkan dan telah mendatangani Perjanjian Tripoli (*Tripoli Agreement*). Perjanjian Tripoli dimediatori oleh oraganisasi internasional yakni OKI. Dari perjanjian tersebut atas kesepakatan antara dua belah pihak yakni untuk melakukan genjatan senjata dan memberi jaminan otonomi bagi 13 provinsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 9 kota di Filipina Selatan. Otonomi tersebut menjamin hak untuk pemerintahan sendiri di atas wilayah tanah air sendiri, otonomi tersebut dianggap banyak pihak sebagai solusi yang cukup adil dalam penyelesaian masalah Moro.[44]

Penjelasan-penjelasan tentang Perjanjian Tripoli penulis akan paparkan lebih mendetail di bab selanjutnya. Di samping membahas tentang Perjanjian Tripoli penulis juga memaparkan tentang Perjanjian Damai antara pemerintah Filipina dengan Muslim Moro pada tahun 1992 yang dinamakan *Peace Agreement.*

**2. Konflik pada Masa Pemerintahan Aquino**

Pada tahun 1985 lensernya Presiden Marcos, yang di lenserkan oleh kelompok-kelompok yang tersisih. Setelah itu, digantikan oleh pemerintahan Aquino. Aquino membuka perundingan dengan Nur Misuari, yang kemudian perundingan dilanjutkan pada tahun 1987 dengan bukti ditandatanganinya "Jeddah Accord" di Jeddah-Arab dan adanya genjatan senjata antara dua belah pihak. Setelah itu Aquino membuat undang-undang yang menjamin pelaksaan otonom melalui referendum. Kebijakan Aquino, yaitu mengeinternasionalisasi konflik di Mindanao dengan menolak adanya keterlibatan peran OKI dalam menengahi konflik antara Pemerintah Filipina

[44] Erni Budiwanti, "Gerakan Pembebasan Moro dan Perjanjian Damai," dalam *Multikulturalisme, Separatisme dan Pembentukan Negara Bangsa di Philipina*(Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ,2003), hal. 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Muslim Moro. Karena, Aquino tidak setuju kalau MNLF dijadikan pengakuan kedaulatan sebagai anggota penuh OKI yang diberikan oleh pihak OKI. Pada akhinya Aquino menjanjikan untuk memberikan keanggotaan penuh terhadap MNLF dengan syarat tanpa keterlibatan OKI.[45]

Manuver OKI memaksa pihak Pemerintah Filipina agar mengembalikan peran OKI dalam memediatori konflik antara pemerintah dengan MNLF. Kemudian wakil-wakil dari Aquino dengan sengaja menjadikan MNLF pecah, agar pelaksanaan otonom yang disepakati antara dua belah pihak ditunda pelaksanaanya dan menjadikan perpecahan tersebut sebagai kendala utama dalam pelaksanaan otonom. Pada tahun 1989 Aquino mendatangani pembentukan ARMM, yang diresmikan pada tahun 1990 yang menghasilkan persetujuan 4 propinsi dari 5 propinsi yang menjadikan Muslim sebagai mayoritas, sedangkan 8 propinsi diduduki oleh Kriten Filipino yang menjadikan sebagai mayoritas.[46] Secara tidak langsung Pemerintah Filipina menjadikan Islam sebagai minoritas, dengan cara penyitaan tanah di daerahnya sendiri melalui hasil referendum. Sebenarnya penyitaan tanah terhadap Muslim Moro sejak datangnya kolonial Amerika dan awalnya setelah kemerdekaan Filipina.

Pemerintahan Aquino sering melakukan pelanggaran dalam genjatan senjata, dan sering pelakukan perlawanan terhadap gerakan MILF pecahan

[45] Ibid., 103-104
[46] Ibid.,105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari MNLF. Setelah itu Aquino digulingkan dengan alasan, yaitu lemahnya Aquino di kalangan angkatan bersenjata yang mengakibatkan faktor dari terhambatnya perundingan antara Pemerintah Filipina dengan MNLF.[47]

[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# GERAKAN-GERAKAN PERLAWANAN MUSLIM MORO DI FILIPINA SELATAN

## A. Munculnya Gerakan-Gerakan Perlawanan di Filipina Selatan

Munculnya gerakan-gerakan separatis Muslim di Filipina Selatan berawal dari kelompok kecil mahasiswa dan para intelektual pada tahun 1960-an. Masalah yang dihadapi oleh gerakan-gerakan separatis yaitu deskriminasi, merosotnya ekonomi (kemiskinan) dan ketidakadilan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengusiran masyarakat muslim moro dari tanah mereka sendiri oleh orang-orang Kristen.[48] Oleh sebab itu, di Filipina selatan terdapat gerakan-gerakan separatis antara lain: *Moro National Liberation Front* (MNLF), *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dan kelompok Abu Sayyaf.

## B. Gerakan-Gerakan Islam di Filipina Selatan

### 1. Gerakan MNLF (Moro National Liberation Front)

*Moro National Liberation Front*/Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) adalah suatu gerakan perjuangan radikal yang menginginkan kemerdekaan penuh bagi Muslim Moro yang berada di Filipina Selatan.

---

[48]John Gershman,"*Peta dan Prospek Gerakan Islam di Filipina*"dalam *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, ed. Moeflich Hasbullah, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2003),hal. 238.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan ini didirikan oleh Nur Misuari pada tahun 1969, anggota-anggotanya dari beberapa kelompok etnis seperti etnis Tausug, Samal dan Yakan. Anggotanya terdiri dari para pemuda yang berlatar belakang dari pendidikan sekuler, pemuda tersebut mendapatkan pelatihan militer di Malaysia. Beberapa orang dari anggota MNLF pernah terlibat dalam gerakan politik mahasiswa aliran kiri.[49]

Sebelum gerakan MNLF berdiri terdapat gerakan lain yaitu gerakan Kemerdekaan Islam/Muslim Independent Movement (MIM). Gerakan MIM ini didirikan oleh Datu Udtog Matalam pada tanggal 1 Mei 1968. Tujuan dari berdirinya gerakan MIM adalah berjuang untuk mencapai kemerdekaan bagi Mindanau dan Sulu.[50] Mendorong gerakan MIM berdiri dikarenakan kondisi perekonomian menurun di kalangan masyarakat Muslim Moro dan kasus pembunuhan besar-besaran di Jubaidah.[51]

Gerakan yang pertama berdiri di Filipina Selatan wilayah Mindanau dan Sulu adalah gerakan MIM yakni gerakan Kemerdekaan Islam. Akan tetapi, gerakan ini dapat ditaklukkan oleh pemerintah Filipina. Kemudian terjadi kekecewaan kepada generasi-generasi muda MIM, dan pada akhirnya berdirilah gerakan MNLF yang dipelopori oleh Nur Misuari. Dia menjabat sebagai seorang lektor dan menjadi anggota staf Pusat Asia, dia lulusan dari

---

[49] Ibid., 241.

[50] Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina*, Terj. Eddy Zainurry (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 43.

[51] Asy'ari dkk, *Pengantar Studi Islam* ( Surabaya: IAIN AMPEL PRESS, 2008), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Filipina jurusan Ilmu Politik. Pemimpin-pemimpin lain MNLF yaitu Hashim Salamat dari Cotabato dan Abdul Khair Alonto dari Lanao. Para pemimpin-pemimpin tersebut mewakili semua etnoliguistik dan kelompok-kelompok daerah lainnya.

Latar belakang berdirinya gerakan MNLF (Moro National Liberation Front) yaitu *pertama*, terjadi perampasan tanah Muslim Moro di Mindanao oleh orang-orang Kristen yang datang ke Mindanao, karena adanya perpindahan penduduk orang-orang Kristen dari Utara ke Selatan orang-orang Islam di Mindanao, peristiwa tersebut atas perintah pemerintahan Filipina. Akibatnya Filipina Selatan khususnya Mindanao dan Sulu menjadi Minoritas, yang asal mulanya dilihat dari segi historis dulu Filipina Selatan adalah mayoritas. *Kedua*, terjadi peristiwa pembunuhan besar-besaran di Jabidah yang dikenal dengan nama *Insiden Corregidor* pada bulan Maret 1968 di pulau Corrogidor.

Pandangan gerakan radikal MNLF yaitu pandangan yang ingin memprakarsai berbagai perubahan dalam masyarakat yang lebih luas, Kebangkitan Islam sering dikaitkan dengan suatu penafsiran yang militan. Seperti hal dalam manifesto MNLF yakni menyerukan pentingnya menegakkan "Bangsa Moro".[52]

---

[52] Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*.,terj. Rochman Achwan, (Jakarta: LP3ES, 1988), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manifesto atau pernyataan dari pembentukan Bangsa Moro yang bertujuan untuk membebaskan diri dari teror dan penindasan penguasa kolonialisme Filipina, mereka memperoleh kemerdekaan pada tanggal 18 Maret 1974 di tanah air mereka yang dipelopori oleh Nur Misuari yang sebagai Ketua Komite Sentral Front Pembebasan Nasional Moro.[53]

Setelah berdirinya gerakan MNLF, kemudian dibentuk tenaga-tenaga militer bagi pemuda-pemuda Muslim Moro dan dilatih di Sabah Malaysia untuk mengikuti latihan militer. Pelatihan tersebut bertujuan untuk menghasilkan keahlian berperang dan keterampilan bersenjata dalam menyerang dan mempertahankan diri dari musuh. Kemudian pada bulan Oktober 1972, gerakan perlawanan Moro secara terbuka menyatakan dirinya sebagai gerakan kemerdekaan Moro. Pengumuman tersebut dilakukan di Marawi dan secara resmi MNLF mengumandangkan perlawanan terhadap Manila guna untuk mencapai Republik Moro merdeka.[54]

Seperti dalam pidatonya Nur Misuari, dia sebagai ketua komite sentral Front Pembebasan Nasional Moro, pidatonya dihadapkan kepada Kongres Internasional mengenai Imperialisme Kebudayaan, yang disponsori oleh Lelio Basso Peace Foundation. Isi Pidatonya tentang tujuan awal politik MNLF dalam kebebasan dan kemerdekaan nasional :

---

[53] Dikutip dari Mahardika,Vol. IX, No. 1, 1982. Dalam bukunya Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina* yang terletak pada lampiran II. 155-156.

[54] Erni Budiwanti, "Gerakan Pembebasan Moro dan Perjanjian Damai," dalam *Multikulturalisme, Separatisme dan Pembentukan Negara Bangsa di Philipina*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2003), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "dan sesuai dengan keinginan massa rakyat kami pada umumnya, MNLF menyusun sebuah program politik yang menuntut pembebasan penuh rakyat dan tanah air nasional kami dari segala bentuk dan sisa-sisa kolonialisme Filipina, untuk menjamin kebebasan rakyat kami dan melestarikan kebudayaan dan peradaban Islam dan asli kami serta warisan revolusi kami.
>
> sesuai dengan itu, MNLF telah mengumumkan niatnya untuk bekerja bagi pemulihan kedaulatan dan kemerdekaan rakyat kami. Pernyataan ini tercantum dalam sebuah manifesto yang telah disampaikan kepada Koperensi Para Menlu Islam ke-5 di Kuala Lumpur, pada bulan Mei 1974.
>
> Rakyat kami mengumumkan berdirinya "Republik Bangsa Moro" dan sebuah pemerintah revolusioner disusun pada semua tingkat di daerah-daerah yang sudah dibebaskan, lengkap dengan aparatnya untuk bidang-bidang politik, militer, ekonomi, peradilan, dan aparat-aparat lainnya. Sesudah itu, dengan penuh gairah rakyat kami menyusun sebuah Parlemen Nasional dan berbagai kongres tingkat provinsi.
>
> singkatnya, sebuah sistem kenegaraan yang lengkap telah lahir."[55]

Gerakan MNLF menyusun program politik yang bertujuan membebaskan diri, untuk rakyat Muslim Moro dari tanah air nasional mereka di bawah pemerintahan kolonialisme Filipina. mereka ingin melestarikan kebudayaan dan peradaban Islam, dan melestarikan warisan perubahan asli Bangsa Moro. MNLF dalam mengumumkan niatnya untuk kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Muslim Moro yang telah tercantum dalam sebuah Manifesto atau pernyataan, yang di sampaikan kepada Konperensi Para Menlu Islam ke-5 di kuala lumpur pada bulan Mei 1974. Kemudian rakyat Muslim Moro mengumumkan berdirinya "Republik Bangsa Moro". Mereka menyusun sebuah Parlemen Nasional dan menyusun sebuah sistem kenegaraan.

---

[55] Lihat Pidato Nur Misuari di palais des nations, Aljir, jazair pada tanggal 11 sampai 15 oktober 1977. Dalam bukunya Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina*, Terj. Eddy Zainurry (Jakarta: LP3ES, 1989), terletak pada lampiran VI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan MNLF mendapatkan bantuan yang berbentuk finansial maupun material dari negara-negara Islam Timur Tengah. Seperti pemimpin Lybia kolonel Muammar Khadaffy, dan dari organisasi Islam OIC (Organisation of Islamic Conference)/ Organisasi Koferensi Islam (OKI). Maka dari itu, sejak tahun 1972 OKI sering membicarakan permasalahan Muslim Filipina Selatan, bahkan dijadikan OKI sebagai agenda tahunan dengan Negara-negara anggota. OKI mendesak pemerintah Filipina yang pada waktu itu pada masa pemerintahannya Marcos guna untuk menyelesaikan permasalahan Muslim Moro di Filipina Selatan dengan pemerintah Filipina.[56]

Usaha-usaha yang dilakukan oleh gerakan MNLF dalam menyelesaikan permasalahannya dengan pemerintah Filipina dapat tanggapan dari OKI, akhirnya OKI pada tahun 1974 mengeluarkan keputusan yang mendesak pemerintah Filipina agar mencari pemecahan politik dan jalan damai atas permasalahan yang ada di Mindanao.[57] Dari paparan tersebut pemerintah Filipina mengadakan perundingan dengan gerakan MNLF untuk mengatasi masalah yang ada di Mindanao. Pulau Mindanao akan menjadi Negara sendiri yang lepas dari Negara Filipina, akan tetapi Negara-negara Islam yang masuk anggota OKI menolak pisahnya Mindanao dari Negara Filipina.

---

[56] Budiwanti, "Gerakan Pembebasan Moro dan Perjanjian Damai," dalam *Multikulturalisme, Separatism*, 94.

[57] Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1977 dan 1978 gerakan MNLF mengalami kesulitan karena mendapat dukungan dari OKI, beberapa pemimpin dari tradisional dan politisi lokal dari Mindanao menganggap OKI berat sebelah, karena OKI mengakui hanya gerakan MNLF yang bisa mempresentasikan kepentingan Bangsa Moro dan sebagai juru bicara Bangsa Moro. Pada akhirnya MNLF mangalami perpecahan karena perbedaan ideologi. Pada waktu itu yang keluar dari gerakan MNLF yaitu Salamat Hashim yang mendirikan gerakan MILF dan pada tahun 1982 gerakan MNLF mengalami perpecahan lagi yakni keluarnya Dimasangkay Pundato yang membentuk Kelompok Reformis MNLF (MNLF Reformist Group).[58]

**2. Gerakan MILF (Moro Islamic Liberation Front)**

*Moro Islamic Liberation Front* atau Front Pembebasan Islam Moro (MILF) adalah gerakan perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim Moro yang bertujuan untuk membebaskan Islam, gerakan tersebut sangat berpengaruh di bagian Filipina Selatan terutama di kawasan Mindanao dan pulau-pulau lainnya.[59] Gerakan tersebut muncul dikalangan orang-orang muslim moro disebabkan adanya dendam, kebencian dan permusuhan terhadap penindasan para penjajah. Gerakan ini menginginkan untuk

[58] Ibid., 102.
[59] Abu Ibrahim Muhammad Daud, *The Secret of Jihad Moro: Fakta-Fakta Perlawanan Kaum Tertindas Moro*,(Solo: media ISLAMIKA, 2008), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membebaskan masyarakat muslim Moro dari pemerintahan pusat Filipina, mereka disebut dengan kaum Separatis.

Gerakan MILF ini pecahan dari MNLF yang memisahkan diri dari gerakan MNLF pada tahun 1977 akan tetapi secara resmi baru didirikan pada tahun 1984, gerakan tersebut berawal dari sebuah kelompok yang dipimpin oleh Salamat Hashim, dia sebagai anggota Komite Sentral. Gerakan MILF ini lebih menekankan pada persoalan-persoalan Islam dan kebanyakan pemimpin-pemimpinnya dari kalangan sarjana Islam yang mempunyai latar belakang agama dan bangsawan tradisional.[60] Pemimpin gerakan ini adalah Salamat Hashim, dia seorang ustadz dan muslim konservatif dari daerah Maguindanao di wilayah Mindanao, dia seorang tokoh yang sangat dihormati oleh banyak Muslim di Mindanao dan di wilayah-wilayah sekitarnya. Dia meninggal pada tahun 2003, pemikirannya dipengaruhi oleh Sayyid Qutb dari al-Ikhwal al-Muslimin di Mesir dan pemikiran-pemikiran Syech Abdul Ala Maududi dari Jamaat Islami di Pakistan.[61]

Latar belakang pecahnya gerakan MILF yang dipimpin oleh Syaikh Asy-Syahid Salamat Hashim dari gerakan MNLF yang dipimpin oleh Prof. Nur Misuari pada tahun 1977 yaitu tidak konsisitennya MNLF terhadap manhaj Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam berjihad dan dalam menegakkan

---

[60] John Gershman,"Peta dan Prospek Gerakan Islam di Filipina"dalam *Asia Tenggara Konsentrasi Baru,* 241.

[61] Kee Vav Dijk,"Mengatasi Separatisme," dalam *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*, ed. Dewi Fortuna, Helene Bouvier, Glenn Smith, dan Roger Tol; terj. Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 229-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Konsep-konsep jihad yang pada awalnya dibentuk oleh Syaikh Asy-Syahid Salamat Hashim dengan Prof. Nur Misuari tentang membentuk sistem pemerintahan islam, akan tetapi dalam perjalanan gerakan MNLF mengalami kemunduran dan melemahnya konsep-konsep jihad yang sudah dibentuk. Karena banyak tawaran yang diterima oleh Prof. Nur Misuari dari kolonial pemerintah Filipina, walaupun dari segi zhahir tawaran tersebut menguntungkan orang-orang Muslim Moro. Maka dari itu, Syaikh Asy-Syahid Salamat Hashim memutuskan untuk memisahkan diri dari gerakan MNLF dan membentuk gerakan Islam yang dinamakan MILF (Moro Islamic Liberation Front).[62]

Melihat perkembangan perjuangan MNLF yang dirasakan kurang memenuhi aspirasi masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan, maka sebagian pejuang Muslim membentuk gerakan terpisah, yaitu Front Pembebasan Islam Moro atau dalam bahasa Inggris disebut Moro Islamic Liberation Front (MILF). Kelompok ini adalah kelompok militan Islam yang berpusat di Filipina selatan wilayah selatan Mindanao, kepulauan Sulu, Palawan, Basilan dan beberapa pulau yang bersebelahan. Perbedaan antara gerakan MNLF dan MILF yaitu, gerakan MNLF menekankan pada sesuatu yang sekuler yang bersifat duniawi, kebanyakan pemimpin-pemimpin dari gerakan tersebut berasal dari pendidikan sekuler. Sedangkan gerakan MILF menekankan pada keislamaan atau permasalahan tentang Islam, kebanyakan

[62] Abu Ibrahim Muhammad Daud, *The Secret of Jihad Moro*, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin-pemimpin dari gerakan tersebut berasal dari pendidikan Islam yang banyak menghasilkan sarjana-sarjana Islam dan ada juga dari para bangsawan tradisional.

Tujuan politik menurut Hashim Salamat sebagai pemimpin MILF yaitu ingin membentuk sebuah Negara Islam yang terpisah dari pemerintah pusat yang akan menjadikan Filipina Selatan sebagai mayoritas Islam. Tujuan yang penting bagi masyarakat moro yaitu dikenal dengan sebutan Mindanao Islamic Republic/Republik Islam Mindanao (MIR). *Mindanao Islamic Republic* (MIR) bertujuan untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi dan memberlakukan syariah (hukum Islam) dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Tujuan tersebut adalah yang akan dicapai melalui strategi gabungan dakwah (Islam khotbah) dan jihad (perang suci).[63] Gerakan ini ingin mendirikan sebuah Negara Islam dan menerapkan hukum-hukum Islam yang ada di dalam Al-Qur'an.

**a. Metode Perjuangan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*)**

Metodologi perjuangan yang digunakan MILF adalah menyempurnakan kepercayaan kepada Allah SAW. Hal tersebut merupakan pernyatan dan kristalisasi dari Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat yang ke-56.*"Tidaklah Aku ciptakaan jin an manusia kecuali untuk*

[63] Angel Rabasa and Peter Chalk, *Indonesia's Transformation and The Stability of Southeast Asia*, (Santa Monica: RAND, 2001), hal. 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*beribadah kepadaku."* Kebijakan, keputusan-keputusan dan aktivitas progam MILF mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mejalankan syariat Islam.[64]

Pendukung gerakan MILF ini dari wilayah Mindanao, yaitu dari Suku Magindanon, Suku Maranon, Suku Iranon, Tausug dan Saranggani. Penyataan dari pemimpin MILF Salamat Hashim tentang populasi Muslim di Mindanao yaitu lebih dari 12 jiwa, yang aktif mendukung MILF sebanyak 85% dan yang lain tidak aktif tetapi hanya sebagai pendukung dana hanya simpati. Pendukung MILF rata-rata berumur antara 16-60 tahun, mereka mendapatkan training militer sehingga menghasilkan ahli-ahli perang yang berpengaruh dan sebagai tulang punggung perjuangan MILF.[65]

Perjuangan gerakan MILF apabila dikaitkan dengan dunia internasional masih belum mendapatkan perhatian yang layak. Karena gerakan ini belum mendapat bantuan yang seimbang dari kaum Muslimin dan para mujahidin internasional. Meskipun MILF sudah banyak melakukan perjanjian dengan pemerintah Filipina sejak tahun 1997 dengan penengah pemerintah Libya Presiden Muammar Khadafi dan OKI (Organisasi Konferensi Islam) dari Indonesia dan Malaysia. Namun

---

[64] Muhammad Daud, *The Secret of Jihad Moro,* 70-71.
[65] Ibid., 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaaat dan kemajuan yang diraih oleh MILF masih sangat kecil dan belum sesuai dengan yang diharapkan.[66]

### 3. Gerakan Abu Sayyaf

Asal-usul nama Abu Sayyaf dari bentuk harfiah artinya pembawa pedang dan secara resmi dikenal sebagai Al-Harakatul al-Islamiyah, dapat ditelusuri ke Afghanistan. Pada tahun 1980, kelompok Moro fundamental mengirim 300 orang, kemudian mengirim 500 orang lagi ke Peshawar, Pakistan, Mujiheddin dan kelompok Moro melakukan perlawanan terhadap invasi Soviet di Afghanistan dan pendudukannya.

Abu Sayyaf adalah suatu gerakan islam yang sangat radikal yang mengiginkan berdirinya Negara Islam yang berdasarkan syariah Islam di Filipina Selatan. Gerakan Abu Sayyaf didirikan oleh Abdulrajak Abubakar Janjalani, dia seorang sarjana Islam dan anggota dari MNLF, dia meninggal terbunuh dalam peristiwa bentrok dengan militer pada Desember 1998. Gerakan ini didirikan pada pertengahan tahun 1980-an. Kelompok Abu Sayyaf ini pecah menjadi beberapa faksi yang berbeda. Kemudian kegiatannya diwarnai dengan perampokkan dan penculikan dari pada perjuangan politik.[67]

---

[66] Muhammad Daud, ibid., 114.

[67] John Gershman,"Peta dan Prospek Gerakan Islam di Filipina"dalam *Asia Tenggara Konsentrasi Baru,* 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan Abu Sayyaf melakukan kegiatan membunuh dan menculik warga sipil terutama orang-orang Kristen yang ada di utara Filipina, dan gerakan ini telah dituduh berhubungan dengan elemen-elemen ekstrimis asing seperti Jemaah Islamiyah dan al-Qaeda. Gerakan ini ada yang mengatakan tidak Islami. Abu Sayyaf merupakan Islam radikal yang akan mendapatkan peringatan berupa pidana, karena telah menodai kepercayaan kelompok Islam. Pemerintah Filipina sendiri menganggapnya sebagai gerakan kriminal terutama dengan loyalitas sedikit cita-cita Islam. Gerakan ini ingin membentuk Negara Islam yang berdasarkan Syari'ah, meskipun gerkan ini pada awalnya mempunyai kelompok yang relatif kecil dan pada akhirnya pecah dan melemah, karena telah banyak mempublikasikan aktivitas kekerasan.[68]

Abu Sayyaf merupakan gerakan yang sering menuntut kemerdekaan dan ingin mendirikan sebuah Negara Islam dengan cara kekarasan. Akibat dari metode kekerasan yang digunakan yaitu gerakan ini sering bermasalah dengan polisi dan militer Filipina. Abu Sayyaf sedikit sekali menggunakan politik perjuangan dan sosialnya.

Pemikiran Abdulrajak Abubakar Janjalani yang extrim dari kaum fundamentalis mengenai hukum Islam, Abdulrajak Abubakar Janjalani mengatakan pada pengikutnya bahwa Islam mengizinkan membunuh musuh

---

[68] Fred R. Von Der Mehden, *Radical Islam in Southeast Asia and its Challenge to U.S. Policy* (Rice University: The James A. Baker III Institute, 2005), 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan merampas hartanya. maksud dari paparan tersebut yakni apabila orang-orang non-Islam menolak untuk di Islamkan maka non-Islam tersebut boleh dibunuh dan merampas hartanya. Maka dari itu, pemikiran dari Abu Sayyaf merupakan pemikiran yang terkenal buruk karena mereka melakukan penculikan tujuan untuk mendapatkan uang tebusan dan melakukan serangan-serangan yang brutal.[69]

Kelompok Abu Sayyaf cepat membuat tanda yakni dengan cara mendirikan reputasi dan dilihat sebagai kelompok kecil tapi mematikan. Pada tahun 1991 Abu Sayyaf mulai melakukan serangan teroris di Filipina. Sebagian besar dari mereka melakukan serangan yang diarahkan ke gereja-gereja Kristen, misionaris, dan masyarakat non-Muslim. Sayyaf memperdalam hubungannya dengan Al Qaeda pada tahun 1991-1995. Sejajar dengan perkembangan kelompok ini sebagai organisasi teroris, Sayyaf terlibat dalam mengobarkan konflik sektarian (konflik yang terpacu pada satu aliran agama), Sayyaf juga memperdalam hubungannya dengan organisasi teroris transnasional. Awalnya, Abu Sayyaf didanai melalui jaringan keuangan yang didirikan oleh Muhammad Jamal Khalifa dan Osama bin Laden saudara iparnya.[70]

---

[69] Kee Vav Dijk,"Mengatasi Separatisme," dalam *Konflik Kekerasan Internal*, 219.

[70]Abuza, Zachary. "*Balik-terrorism: the return of the abu sayyaf.*" Dalam www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/ssi/newsletter.cfm. (September 2006), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1998 Munculnya Khadaffy Janjalani setelah kematian dari pendiri Abu Sayyaf yakni Abdurajak Janjalani, pada masa kepemimpinan Khadaffy Janjalani Abu Sayyaf dibagi menjadi tiga faksi yang berbeda yang menjadi lebih dari penjahat yang sangat kejam dan sebagai penculik. Khadaffy Janjalani pernah dilatih di Afghanistan. Dia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer pertama di Marawi, kemudian di Zamboanga dia direkrut oleh saudaranya dan dikirim ke Afghanistan. Dia dilatih di sebuah kamp Al Qaeda di dekat Mazar e-Sharif pada awal 1990. Dia juga memimpin sekelompok 20 orang Muslim Moro.[71]

[71] Ibid., 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN MASYARAKAT MUSLIM MORO DI FILIPINA SELATAN

## A. Urgensi Penyelesaian Konflik

Dari beberapa konflik yang terjadi di Negara Filipina, terutama Filipina di bagian Filipina selatan yang mengalami permasalahan yang berturut-turut mulai dari pada masa penjajah Spanyol dan Amerika sampai dengan pemerintah Filipina sendiri, karena pemerintah Filipina telah meneruskan suatu kebijakan yang pernah dilakukan oleh para penjajah. Dengan demikian apabila di hubungkan teori yaitu menggunakan teori yang ditekankan oleh Luc van de Goor, Kumar Rupesinghe dan Paul Sciarone tentang teori "*Conflict in Post-colonial*" tentang suatu konflik yang dipengaruhi oleh para penjajah yang datang yang mempunyai tujuan tertentu dan pengaruhnya masih diberlakukan oleh pemerintahan pusat.[72]

Penerapan dari tersebut, konflik tersebut yang paling dominan terjadi di kalangan masyarakat Muslim Moro di kepulauan Mindanao dan Sulu yang terletak di bagian Filipina Selatan dengan pemerintah Filipina yang kebanyakan mayoritas orang-orang Kristen. Konflik tersebut terjadi karena masyarakat Muslim Moro tidak mau menerima kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para penjajah maupun

---

[72] Aleksius Jemadu, *Poitik Global dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 187.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Filipina sendiri. Akan tetapi, sebagian kecil dari kalangan Muslim yang mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para penjajah maupun pemerintah Filipina, yang mengikuti kebijakan-kebijakan tersebut yakni dari kalangan muslim bangsawan atau kelompok elit dan menyatuh dengan Kristen, karena mereka tidak ingin kehilangan jabatan.

Pada tanggal 4 Juli 1946 Filipina mengalami kemerdekaan, meskipun Filipina mengalami kemerdekaan terutama dibagian Filipina Selatan yang mayoritas Islam tidak merasakan perubahan pada diri mereka, karena mereka mengalami penindasan yang dilakukan pemerintah Filipina dengan berbagai cara untuk mengancurkan masyarakat Muslim Moro. Pemerintah Filipina mayoritas beragama Kristen, sedangkan bagian dari Filipina yakni Filipina Selatan yang mayoritas beragama Islam yang disebut dengan Bangsa Moro. Apabila dilihat dari akar sejarahnya kedua agama tersebut saling bermusuhan dan sampai mengakibatkan terjadinya peperangan. Peperangan tersebut tejadi pada masa penjajah Spanyol yang di sebut *Perang Moro* yaitu perang yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pribumi Filipina yang berhasil di Kristenkan oleh penjajah Spanyol dengan orang-orang Islam Bangsa Moro. Dari peristiwa-peristiwa tersebut orang-orang Islam tidak merasakan perubahan dan ketenangan meskipun telah mengalami kemerdekaan.

Dari paparan tersebut apabila dihubungkan dengan teori yang dalam *teori Pascacolonialism* Ania Loomba dalam bukunya yang berjudul *Colonialism/PosColonialism* menyatakan, "Negara bangsa yang baru merdeka hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membagikan buah buah secara selektif dan timpang kepada rakyat. Digulingkannya pemerintahan koloni tidak secara otomatis membawa perubahan ke arah perbaikan status perempuan, kelas pekerja, atau petani di kebanyakan Negara jajahan."[73] teori menjelaskan bahwa kolonial tidak hanya menguasai bangsa-bangsa pribumi saja, akan tetapi kolonial juga menerapkan sistem pemerintahannya di Negara jajahan. Sistem pemerintahan baru tidak membawa dampak positif bagi rakyat umum yang digunakan oleh Negara jajahan setelah mengalami kemerdekaan yakni masih menggunakan dan meneruskan sistem pemerintahan yang digunakan oleh para kolonial.

Penerapan teori di atas apabila dihubungkan dengan Negara Filipina yakni pemerintah Filipina sampai saat ini menggunakan sistem pemerintahan yang digunakan oleh penjajah Amerika. Sistem pemerintahan yang masih digunakan pemerintah Filipina yakni kebijakan Amerika tentang perpindahan etnik Filipino (orang-orang mayoritas beragama Kristen) dari utara dan tengah Filipina ke wilayahnya mayoritas Muslim Mindanao dan Sulu yang terletak di bagian selatan Filipina dan penerapan sistem-sistem pendidikan yang mempunyai nilai-nilai Barat. Akibat dari kebijakan tersebut tidak membawa masyarakat Muslim Moro menjadi lebih baik dan tidak bisa membawa dampak positif bagi Muslim Moro, akan tetapi kebijakan tersebut merugikan umat Islam Bangsa Moro karena banyak tanah mereka dirampas oleh pendatang Kristen dan mereka menjadi minoritas di tanah kelahirannya

[73] Mudji Sutrisno dan Hendra Putranto, *Hermeneutika Pascakolonial Soal Identitas* (Yogyakarta: Kansius,2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. di samping itu akibat politik dan ekonomi dari imigrasi yakni telah memperburuk hubungan antara Muslim dengan Kristiani.

Upaya Pemerintah Amerika yang dijalankan kemudian pemeritahan tersebut dilanjutkan oleh Pemerintah Filipina yakni untuk menyatukan masyarakat Muslim Moro melalui akomodasi elite Muslim ternyata tidak berhasil, karena kecendrungan dalam menganakemaskan kelompk kecil tidak membuka saluran bagi masyarakat Muslim Moro secara keseluruhan. Bahkan dari peristiwa tersebut elite Muslim justru kehilangan kepercayaan di kalangan masyarakat Muslim Moro, walaupun elit Muslim agen pemerintah pusat.[74]

Selain teori-teori di atas yang telah penulis paparkan, penulis juga menggunakan teorinya Michael Brown tentang *Nationalism and Ethnic Conflict*, pandangannya yakni terdapat 2 faktor akibat terjadinya konflik yaitu faktor struktural dan faktor politik.[75] Faktor stuktural menekankan pada *weak state* (lemahnya negara), keamanan dalam negeri dan etnisitas suatu wilayah. Apabila dihubungkan dengan konflik Filipina yaitu etnisitas (kesukuan) yang bertempat di wilayah Mindanao yaitu penduduk asli yang mempunyai budaya ketimuran sedangkan Filipina bagian utara membawa budaya barat. Faktor politik bisa dilihat dari pemicu ketegangan antar etnis. Ketegangan etnis berkaitan dengan sistem politik, ideologi politik yang berlaku, dinamika politik antar kelompok dan perilaku elit. Apabila dihubungkan dengan

---

[74] Iik Arifin Mansunoor, "Islam di Asia Tenggara," dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 6*. Ed. Taufik Abdullah. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2002), 315.

[75] Nasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009)hal. 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Filipina Selatan yaitu masyarakat muslim Moro sering melakukan pemberontakan karena kalangan elit tidak memihak kepada kepentingan muslim Moro buktinya muncul gerakan-gerakan radikal seperti MNLF, MILF, dan Abu Sayaf.

Perjuangan Bangsa Moro dapat perhatian dan bantuan dari militer pihak luar, terutama Malaysia (terutama Sabah) dan Libya. Kemudian dapat dukungan tanpa henti-hentinya dari Konferensi Islam internasional yang dibarengi dengan boikot minyak dan telah mengantarkan pada perjanjian Perdamaian Tripoli yang telah menguntungkan gerakan MNLF.[76]

Faktor yang penting dalam mendorong bangkitnya Islam di Filipina yaitu adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh militer Filipina dan pemberlakuan undang-undang darurat yang diterapkan oleh pemerintah Filipina. Situasi konflik di Filipina selatan menarik perhatian Negara-negara Islam terutama di Timur Tengah. Maka dari itu, pemerintah Filipina memutuskan untuk mengambil tindakan dalam penyelesaian konflik yang ada di Filipina Selatan. Pemerintah Filipina dalam menanggapi konflik tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu kebijakan konsisliasi dan pembangunan wilayah.[77]

Upaya-upaya dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan cara Konsiliasi. Konsiliasi berasal dari kata Latin *Conciliatio* atau perdamaian yaitu suatu cara untuk

---

[76] Masdar Hilmy, "Minoritas Muslim Asia Tenggara di Tengah Pergumulan Identitas Studi Kasus di Filipina dan Thailand." Dalam *Akademika Jurnal Studi Keislaman Vol. 07, No.1, September 2000*, (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2000), 79.

[77] Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Pemerintah Filipina melakukan kebijakan konsiliasi dengan cara membuka dialog-dialog terbuka dengan semua kelompok yang terlibat dalam pemberontakan terutama dengan gerakan-gerakan Islam separatis yang dipelopori oleh Nur Misuari dari gerakan MNLF dan penyelesaian konflik tersebut dapat diterima oleh pihak-pihak pemberontak. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut terdapat pihak ketiga yakni OKI (Organisasi Koferensi Islam).

## B. Perjanjian Tripoli Tahun 1976

Dalam bukunya Majul yang berjudul *Dinamika Islam Filipina*, penulis mengutip dalam lampiran yang terlampir dalam bukunya Majul yakni tentang persetujuan antara pemerintah Filipina dengan gerakan separatis MNLF (Front Pembebasan Nasional Moro), dengan adanya partisipasi para anggota komisi dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Sekretaris Jenderal Konferensi Islam yakni sebagai berikut:

> "sesuai dengan Resolusi No. 4 Para. 5 yang telah disetujui oleh Dewan Menteri Konperensi Islam dalam persidangannya yang keempat di Benghazi, Republik Arab Libya, dalam bulan Shafar 1393 Hijriyah yang bertepatandengan bulan Maret 1973, yang menyerukan dibentuknya Komisi Tingkat Menteri Empat Negara yang mewakili Republik Arab Libya, Kerajaan Arab Suadi, Republik Senegal Republik Somalia, untuk mengadakan perundingan dengan Pemerintah Republik Filipina mengenai situasi kaum Muslim di bagian selatan Filipina.
> Dan sesuai dengan Resolusi No. (18) yang telah disetujui oleh Konperensi Islam yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, dalam bulan Jumadil Akhir 1393 Hijriyah yang bertepatan dengan bulan Juni 1974 M., yang merekomendasikan upaya mencari penyelesaian yang adil dan damai mengenai masalah orang-orang Islam di Filipina Selatan melalui perundingan;
> Dan sesuai dengan Resolusi No. 12/7/S yang telah disetujui oleh Konperensi Islam di Istambul dalam bulan Jumadil Awal 1396 Hijriyah yang bertepatan dengan bulan Mei 1976 M., yang memberi kuasa kepada Komisi Tingkat Menteri Empat Negara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sekretaris Jenderal Konperensi Islam untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi dimulainya kembali perundingan-perundingan;
> Dan sebagai kelanjutan tugas yang dipikul oleh Komisi Tingkat Menteri Empat Negara dan Sekretaris Jenderal Konperensi Islam serta pembicaraan-pembicaraan yang telah diadakan dengan yang Mulia Presiden Marcos dari Republik Filipina.
> Dan sebagai perwujudan ini para (6) komunike ini Bersama yang dikeluarkan di Tripoli tanggal 25 Dzulqaidah 1396 H. yang bertepatan dengan 17 November 1976 M., setelah kunjungan resmi delegasi Pemerintah Filipina di bawah pimpinan Ibu Negara Filipina Nyonya Imelda Romualdez Marcos ke Republik Arab Libya, dan yang menyerukan dimulainya kembali perundingan antara kedua pihak yang bersangkutan di Tripoli pada tanggal 15 Desember 1976 M.[78]

Penulis akan menjelaskan dari paparan data di atas yaitu pada bulan Maret 1973 terdapat pertemuan yang diwakili oleh empat Negara yaitu Libya, Arab Saudi, Senegal dan Somalia. Dalam pertemuan ini di setujui oleh para pemimpin Organisasi Konferensi Islam (OKI), tujuan dalam pertemuan ini yaitu ingin mengadakan perundingan dengan pemerintah Filipina guna untuk menyelesaikan permasalahan Muslim Moro di Filipina Selatan. Pertemuan tersebut diadakan di Benghazi, Arab Libya.[79]

Setelah itu diadakan pertemuan lagi di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Juni 1974, menghasilkan pernyataan tentang upaya-upaya mencari penyelesaian masalah di Filipina Selatan secara adil dan damai melalui jalan perundingan-perundingan yang telah diadakan. Kemudian pada tanggal 17 November 1976 utusan dari Pemerintah Filipina yang dikirim oleh presiden Marcos yaitu istrinya yang bernama Nyonya Imelda Romualdez Marcos ke Negara Timur Tengah yaitu Libya. Tujuan dari datangnya istri Marcos tersebut yakni menyerukan diadakannya kembali

---

[78] Lihat lampiran arsip dalam bukunya Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina,* 133-134.
[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundingan-perundingan antara Pemerintah Filipina dengan Muslim Bangsa Moro di Tripoli pada tanggal 15 Desember 1976.[80]

Gerakan MNLF menarik perhatian internasional, dunia Islam berkecimpung dalam mencari jalan damai antara Pemerintah Filipina dengan gerakan separatis dengan berbagai pendekatan. Mediasi internasional meraih sukses dalam usahanya untuk menyelesaikan konflik antara Pemerintah Filipina dengan Gerakan separatis. Beberapa kali yang dilakukan oleh pihak internasional yaitu melakukan pertemuan-pertemuan diantaranya di Arabia pada tahun 1975, di Libya pada tahun 1976, dan di Manila pada tahun 1977. Akhirnya dari pertemuan tersebut menghasilkan resolusi dari konflik yang terjadi yakni adanya Perjanjian Tripoli pada tahun 1976. Isi dari Perjanjian Tripoli yaitu otonomi harus diberikan kepada kaum Muslim di Filipina Selatan, supaya mereka mengurus wilayahnya sendiri. Akan tetapi, kaum Muslim di Filipina Selatan mengalami kekecewaan kepada Pemerintah Filipina, sebab ketika dilakukan referendum yang menunjukkan tidak diinginkannya otonomi yang telah diberikan kepada kaum Muslim. Pada akhirnya konflik tersebut terjadi lagi, kemudian masyarakat Muslim Moro menuduh Pemerintah Filipina melakukan pemilihan yang curang dan licik, sehingga mereka menolak hasil referendum.[81]

Pada bulan Januari 1975 dilaksanakannya perundingan pertama kali yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina dengan gerakan-gerakan pemberontak yang diwakili oleh gerakan MNLF yang dipimpin oleh Nur Misuari. Kemudian pada akhir

---

[80] Ibid.

[81] Kuntowijiya, *Paradigm Islam Interpretasi untuk Aksi* , ed. A.E. Priyono (Bandung : Mizan, 1993), 73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1976 Imelda Romualdez Marcos mengadakan perundingan di Tripoli, Libya dengan Kolonel Khadafi guna untuk menyelesaikan permasalahan Muslim Moro di Filipina Selatan. Perundingan antara belah pihak menghasilkan Perjanjian Tripoli (*Tripoli Agreement*) yang ditandatangani pada 23 Desember 1976. Dari perundingan tersebut dimediatori oleh OKI (organisasi Konferensi Islam). Isi dari Perjanjian Tripioli tersebut yaitu melakukan genjatan senjata dan Pemerintah Filipina memberi jaminan otonom bagi 13 provinsi dan 9 kota di Filipina Selatan yang meliputi Basilan, Sulu, Tawi-tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Nort Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, Lanao del Sur, Davao del Sur, South Cotabato, dan Palawan. Otonomi tersebut diajukan oleh komite empat Negara seperti yang dipaparkan yaitu tentang pemerintahan sendiri (*self-government*) dalam kedaulatan nasional Filipina dan penyatuan daerah Filipina. Dalam otonomi yang diberikan Pemerintah Filipina, masyarakat Muslim Moro diberikan hak untuk mendirikan sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam, mendirikan pendidikan yang di dalamnya terdapat kurikulum Islam, memiliki sistem administrasi pemerintahan sendiri.[82]

Salah satu dari hasil dari Perjanjian Tripoli, yaitu adanya dua pemerintah regional otonom yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Filipina dengan gerakan MNLF pada tanggal 23 Desember 1976. Tujuan dibentuknya dua pemerintahan tersebut merupakan kesatuan politik untuk memperkuat pemerintah

---

[82] Erni Budiwanti, "Gerakan Pembebasan Moro dan Perjanjian Damai," dalam *Multikulturalisme, Separatisme dan Pembentukan Negara Bangsa di Philipina*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2003), 96-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

local. Fungsi dari dibentuknya dua pemerintah yaitu *pertama*, mendorong tercapainya perdamaian dan kestabilan. *Kedua*, menempatkan kembali orang-orang yang sebelumnya pernah menyingkir. *Ketiga*, mempercepat pembangunan social-ekonomi wilayah.[83]

Perjanjian Tripoli ini bukan alat perdamaian untuk memecahkan permasalahan masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan. Perjanjian ini hanya merupakan permainan kekuasaan dari presiden Marcos, supaya bisa mengambil hati dari Negara-negara Islam yang menguasai ekspor Minyak. Carmelo Barbero sebagai juru runding utama GRP (Government Republic Philippine) yang menambahkan dari isi perjanjian tersebut yaitu Pemerintah Filipina akan mengambil langkah-langkah yang mengikuti proses konstitusional yang dianggap perlu bagi pelaksanaan keseluruhan perjanjian. Pada akhirnya Perjanjian Tripoli ini gagal karena adanya perbedaan-perbedaan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian tersebut dan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina sendiri pada masa presiden Marcos. Di samping itu juga perundingan-perundingan terhenti dan Marcos secara sepihak memutuskan untuk menyelenggarakan pemungutan suara secara langsung mengenai otonom di Mindanao.[84]

Puncak Perjuangan masyarakat Muslim Moro pada tahun 1976 yaitu dengan adanya penandatanganan Perjanjian Tripoli antara Pemerintah Filipina dengan gerakan separatis MNLF. Dari perjanjian tersebut pihak Pemerintah Filipina

---

[83]Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan,* 351.
[84] Erni Budiwanti, "Gerakan Pembebasan Moro, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan hak otonom bagi masyarakat Muslim Moro. Namun, pada akhirnya Perjanjian Tripoli diingkari oleh pihak pemerintah sendiri dan mengecewakan bagi masyarakat Muslim Moro.

Pada tanggal 29 Desember 1976 disetujui adanya genjatan senjata kedua belah pihak saling menyalakan antara Pemerintah Filipina dengan gerakan MNLF, pada akhirnya pada bulan April 1977 tidak ada perundingan-perundingan yang berlangsung antara Pemerintah Filipina dengan gerakan MNLF. Pada tahun 1977 terhentilah pembicaraan Tripoli dan menghambatnya resolusi-resolusi yang diperankan oleh Konferensi Islam Menteri-Menteri Luar Negeri (ICFM). Dari peristiwa tersebut gerakan MNLF yang dipimpin oleh Nur Misuari menuduh Pemerintah Filipina, bahwa Pemerintah Filipina melanjutkan atas dilakukannya *genocide* (pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan bangsa) terhadap orang-orang Islam di Filipina Selatan. Kemudian Nur Misuari melakukan niatnya yang dulu yakni ingin memisahkan diri dan kemerdekaan Islam dari Pemerintah Filipina. Setelah itu Misuari mengumumkan niatnya yang ingin memisahkan diri di surat kabar *Arab News* yang terletak di Jeddah, atas dukungan ICFM terhadap tawaran untuk memisahkan diri. Maka dari itu, dari peristiwa tersebut pada bulan Juni 1981 dijadwalkan untuk melakukan pertemuan mengenai pemisahan diri di Bagdad.[85]

---

[85] Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina, 96-98.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Resolusi Kongres Islam Filipina Tahun 1981

Pada bulan September 1980, munculah salah satu dari dua tokoh BMLO (Organisasi Pembebasan Bangsa Moro) yang terkemuka yaitu Salipada Pendatum. Akibat kembalinya Pendatum dari luar negeri yaitu adanya akivitas kembali Asosiasi Islam Filipina (Muslim Association of the Philippines) yang disebut dengan MUSAPHIL. Dahulu organisasi ini sering digunakan untuk menyuarakan tujuan-tujuan dan aspirasi Islam, dan kongres-kongresnya yang diwakili yang orang-orang Islam. [86]

Akhirnya diselenggarakan Kongres Islam Filipina di Manila pada tanggal 30 April sampai Mei 1981 guna untuk mendiskusikan "Kesadaran Islam bagi Solidaritas dan Kerujukan Nasional". Tujuan dari kongres yang diadakan MUSAPHIL yaitu untuk mengungkapkan keluhan orang-orang Islam yang dialami. Dari kongres tersebut yang menghasilkan resolusi-resolusi. Resolusi-resolusi yang dihasilkan yaitu: *resolusi pertama*, memberi tahu pemerintah Filipina dan ICFM (Konferensi Islam Menteri Luar Negeri) tentang orang-orang Islam Filipina yang menerima ketetapan-ketetapan Perjanjian Tripoli sebagai pedoman bagi pendirian otonomi di wilayah Filipina Selatan. *Resolusi kedua*, memohon kepada ICFM untuk mendesak pemerintah Filipina dan gerakan MNLF guna untuk melanjutkan pembicaraan mereka atas Perjanjian Tripoli.

*Resolusi ketiga*, memberikan hak kuasa kepada MUSAPHIL untuk bertindak di dalam maupun di luar negeri yaitu sebagai juru bicara bagi orang-orang Islam

---

[86]Ibid., 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Filipina demi kesejahteraan Muslim Moro, supaya Muslim Moro mengemukakan kebutuhan-kebutuhan dan keluhan-keluhan yang mereka rasakan terhadap Pemerintah Filipina maupun baban-badan internasional.

*Resolusi keempat*, memberikan hak kuasa kepada MUSAPHIL untuk mengirimkan utusan ke pertemuan para menteri luar negeri Islam (ICFM) pada bulan Juni 1981di Baghdad Irak, guna untuk mengajukan orang-orang Islam Filipina dalam mendapatkan penyelesaian awal, adil dan damai terhadap masalah mereka yang dihadapi. Dalam resolusi keempat ini juga ICFM menyatakan secara resmi mengakui masalah Muslim Moro yang di wakili oleh gerakan MNLF dengan pemerintah Filipina, maka dari itu diskusi-diskusi dibatasi hanya menyangkup permasalahan yang dialami Pemerintah Filipina dengan gerakan MNLF.

*Resolusi kelima*, tertuju kepada masalah pengungsi dan memohon kepada ICFM supaya menggerakkan badan pertolongan yang telah dibentuk untuk orang-orang Islam Filipina, dalam salah satu resolusi pertemuan yang pernah diadakan di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 1974. Resolusi terakhir yakni *resolusi keenam*, meminta ICFM supaya menghidupkan genjatan senjata termasuk dalam Perjanjian Tripoli pada tahun 1976. Selain itu, pelaksanaan undang-undang baru tentang sistem peradilan *syari'ah* dan memperkuat pemerintah otonom wilayah 9 dan 12 dengan membuat kumpulan undang-undang.[87]

Kendala dari terhentinya perundingan tersebut dalam penyelesaian konflik yakni terjadinya perpecahan dari gerakan MNLF pada tahun 1979, disebabkan

[87] Ibid., 97-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya perbedaan ideologi dan penafsiran pelaksanaan otonom didalam pemikiran para tokoh-tokoh elit gerakan MNLF, khususnya dalam mewujudkan pemikiran Moro untuk bersatu yang mencakup wakil-wakil dari masing-masing golongan. Pada waktu itu, OKI hanya mengakui gerakan MNLF yang mewaliki masyarakat Muslim Moro yang dipimpin oleh Nur Misuari.[88]

## D. Perjanjian Damai Tahun 1996

Pada bulan Maret 1985, Presiden Marcos ditumbangkan oleh kelompok-kelompok Moro yang bergabung dalam aksi kelompok perlawanan. Kemudian pada tahun yang sama terjadi revolusi dengan bergolaknya *people power* yang kemungkinan akan membuka kompromi dan negosiasi dalam pelaksanaan otonomi di Mindanao.[89] Melihat dari peristiwa tersebut akan terjadi perubahan setelah jatuhnya kepimpinan Marcos, kemudian akan diadakan pemilihan lagi setelah tumbangnya Marcos. Dan kemungkinan perundingan-perundingan yang pernah terjadi akan dilanjutkan kembali setelah kepemimpinan Presiden Marcos.

Setelah itu, kepimpinannya digantikan oleh Aquino sebagai Presiden Filipina. Presiden Aquino membuka perundingan dengan pimpinan gerakan MNLF yaitu Nur Misuari. Perundingan tersebut merupakan perundingan pertama kalinya dalam masa pemerintahannya. Kemudian perundingan tersebut berlanjut pada bulan Januari 1987 dengan ditandatanganinya *Jeddah Accord* yang dilaksanakan di Jeddah-Arab Saudi

---

[88] Erni Budiwanti,"Tantangan Pembangunan Negara Bangsa , 86-87.
[89] Erni Budiwanti, "Gerakan Pembebasan Moro, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara Pemerintah Filipina dengan gerakan MNLF. Perundingan tersebut dari kesepakatan antara dua belah pihak menghasilkan dengan adanya persetujuan proposal yang menjamin pelaksanaan otonom penuh di Mindanao. Kemudian Aquino membentuk undang-undang tentang jaminan pelaksanaan otonom bagi Muslim melalui referendum, karena ditakutkannya seperti dalam Perjanjian Tripoli.[90]

Pada masa pemerintahan Aquino perundingan masih berlanjut antara Pemerintah Filipina dengan MNLF, dan dengan berlanjutnya ditandatanganinya ARMM (*Autonomous Region for Muslim Mindanao*) yaitu suatu pemerintahan otonom yang memiliki badan eksekutif dan legislative dengan berbagai cabangnya. Hasil dari pemungutan suara (referendum) hanya 5 provinsi dari 13 provinsi di Filipina (Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Manguindanao, Lanao del Sur) yang mayoritas Islam yang masuk dalam ARMM. Sedangkan yang 8 provinsi mayoritas Kristen yang memperoleh tanah dari hasil menyita tanahnya Bangsa Moro semenjak pada masa kolonial dan awal kemerdekaan Filipina. Pada masa pemerintahan Aquino perjanjian genjatan senjata yang telah disepakati antara dua belah pihak sering dilanggar, dengan bukti adanya perlawanan antara Pemerintah Filipina dengan gerakan MILF. Sedangkan angkatan bersenjata Aquino sangat lemah..[91] dari faktor tersebut terjadilah hambatan perundingan antara pemerintah dengan MNLF. Kemudian digulingkanlah masa pemerintahannya Aquino.

---

[90] Ibid.
[91] Ibid., 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa pemerintahan Aquino digantikan oleh Ramos. Kemudian Presiden Ramos mengadakan perundingan dengan MNLF, hasil dari perundingan tersebut yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian damai pada bulan September 1996. MNLF juga menerima pembentukan ARMM yang meliputi 5 provinsi dan gubernur ARMM yaitu Nur Misuari. Perjanjian damai pada masa pemerintahan Ramos dilaksanakan menjadi dua tahap yaitu *tahap pertama*, Pembentukan Dewan Perdamaian dan Pembangunan untuk Filipina Selatan (*Southern Philippines Council for peace and development*/SPCPD) dan Dewan Penasehat (*Consultative Assembly*). Dua lembaga ini gunanya untuk mefasilitasi semua anggota MNLF ke dalam pemerintahan. *Tahap kedua*, Pemerintah Pusat mengawasi pelaksanaan referendum di 13 provinsi dan 9 kota dalam menentukan status masing-masing sebagai daerah otonom.[92]

SPCPD kurang berperan dalam menjalankan otonomi di ARMM, karena SPCPD tidak memiliki otoritas politik dan ekonomi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di dalam ARMM. Karena semua otoritas dipegang Otoritas Pengembangan Ekonomi Nasional yang berpuat di Manila. Maka dari itu, hal tersebut menghambat penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dan Bangsa Moro.[93]

Pada dasarnya perjanjian damai pada tahun 1996 merupakan lanjutan dari Perjanjian Tripoli pada tahun 1976. Yang membedakannya yakni pada perjanjian

---

[92]Erni budiwanti,"*Tantangan Pembangunan Negara Bangsa* , 87.
[93]Ibid 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

damai pada tahun 1996 yaitu pada perjanjian tersebut dibagi menjadi dua tahap seperti yang telah dijelaskan penulis di atas. Konflik antara Pemerintah Filipina dengan Masyarakat Muslim Moro suda berlangsung lama yakni selama 24 tahun yang telah menelan banyak korban jiwa. Akan tetapi dari paparan yang telah dijelaskan bahwa Pemerintah hanya ingin berunding dengan gerakan MNLF, dan pemerintah tidak mau berunding dengan gerakan separatis lainnya seperti gerakan MILF dan kelompok Abu Sayyaf, karena gerakan-gerakan tersebut dianggap oleh Pemerintah Filipina sebagai kelompok garis keras yang tidak mengakui kemerdekaan negara dan penyatuan teritorial Filipina, kelompok-kelompok tersebut menginginkan kemerdekaan Muslim Moro yang terpisah dengan Pemerintah Filipina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Konflik di Filipina merupakan konflik akibat dari penjajah yang datang ke Filipina. Muslim Moro berperang melawan penjajah Spanyol pada tahun 1521-1898 selama 377 tahun, pada abad ke-16. Moro berusaha membebaskan diri dari penjajah Amerika selama 47 tahun yang dimulai pada tahun 1898-1946. Setelah kemerdekaan pada tahun 1946, secara tidak langsung penjajahan dilanjutkan oleh Pemerintah Filipina dengan melakukan berbagai tekanan-tekanan. Terdapat 3 (tiga) kepemimpinan presiden di Filipina yang sangat mempengaruhi terjadinya perlawanan, yaitu Ferdinan E. Marcos, Corazon Aquino dan Fidel V. Ramos.
2. Dari tekanan-tekanan yang dialami oleh masyarakat Muslim Moro, berakibat munculnya gerakan separatis, yaitu gerakan MNLF (*Moro National Liberation Front)* adalah organisasi islam yang bertujuan untuk memerdekaan diri (*Self-Determination*) yang dipimpin oleh Nur Misuari, MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) kelompok pecahan memisahkan diri dari MNLF pada tahun 1977 akan tetapi secara resmi baru didirikan pada tahun 1984 yang dipimpin oleh Hashim Salamat, dan kelompok Abu Sayaf didirikan pada tahun 1991 dipimpin oleh Abdulrajak Abubakar Janjalani.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Upaya-upaya penyelesaian konflik Filipina dilakukan dengan mengadakan perundingan-perudingan yang menghasilkan resolusi damai. Pada masa pemerintahan Presiden Ramos diselenggarakan Perjanjian Tripoli pada tahun 1976 di Libya antara Pemerintah Filipina dengan MNLF yang mewakili Muslim Moro, yang dimediatori oleh OKI. Akan tetapi pada akhirnya Perjanjian tersebut gagal. Kemudian upaya perdamaian diselenggarakan oleh Presiden Aquino dengan ditandatanganinya "Jeddah Accord" dan adanya genjatan senjata tanpa adanya keterlibatan OKI antara Pemerintah Filipina dengan MNLF. Namun kembali mengalami kegagalan karena adanya pelanggaran genjatan senjata, yang dilakukan oleh pihak militer dan kepolisian. Pada masa pemerintahan Ramos terjadi upaya perdamaian yang melibatkan OKI kembali. Kemudian adanya genjatan senjata yang ditandatanganinya *Peace Agreement* (Perjanjian Damai) pada September 1996 antara Pemerintah Filipina dengan MNLF yang mewakili Muslim Moro.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Minoritas Islam Di Filipina (Kajian Sejarah Konflik Antara Pemerintah Filipina Dan Masyarakat Moro), penulis menyarankan : sebetulnya konflik yang terjadi antara Pemerintah Filipina dengan gerakan MNLF yang mewakili masyarakat Muslim Moro ini tidak akan berlarut-larut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau masing masing kedua belah pihak mau mengalah dan mentaati isi daripada perjanjian/kesepakatan yang telah ditetapkan dan setujui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Abdullah, Taufiq dan Sharon Siddique. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES. 1988.

Abdullah, Taufik (ed.). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2002.

Abdurahman, Dudung. *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2007.

Abuza, Zachary. "*Balik-terrorism: the return of the abu sayyaf.*" Dalam www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/ssi/newsletter.cfm. (September 2006)

Asy'ari dkk. *Pengantar Studi Islam*. Surabaya: IAIN AMPEL PRESS. 2008.

Azra, Azyumardi. *Renaisans Islam Asia Tenggara*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

Budiwanti, Erni "*Gerakan Pembebasan Moro dan Perjanjian Damai*," dalam *Multikulturalisme, Separatisme dan Pembentukan Negara Bangsa di Philipina*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2003.

Budiwanti, Erni."*Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina Gerakan Separatism Moro.*"dalam *Prosiding Seminar Refleksi Aktur Tahun 2003 Keduptan Bidang IPSK*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2004.

Daud, Abu Ibrahim Muhammad. *The Secret of Jihad Moro: Fakta-Fakta Perlawanan Kaum Tertindas Moro*. Solo: media ISLAMIKA. 2008.

Fortuna, Dewi dan Helene Bouvier, DKK. *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik.* terj. Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005.

Gandhi, Leela. *Teori Poskolonial Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat.* Yogyakarta: Qalam. 2001.

Hasbullah, Moeflich. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebankitan Islam.* Bandung: Fokusmedia. 2003.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hilmy, Masdar. "Minoritas Muslim Asia Tenggara di Tengah Pergumulan Identitas Studi Kasus di Filipina dan Thailand." Dalam *Akademika Jurnal Studi Keislaman Vol. 07, No.1, September 2000*. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel. 2000.

Kettani, Ali M. *Muslim Minorities In The World Today/ Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Penerjemah: Zarkowi soejoeti. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.

Liow, Joseph Chinyang. *Muslim Resistence in Southern Thailand and Southtern Philippiness: Religion, Ideology, and Politics*. Washington: East-West Center. 2006.

Majul, Cesar Adib. *The Contemporary Muslim Movements in The Philippines/ dinamika Islam Filipina*. Pernerjemah: Eddy Zainurry. Jakarta: LP3ES, 1989.

Mangandaralam, Syahbuddin. *Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1995.

Mc Vey, ruth. *Kaum kapitalis asia tenggara: patronase negara dan rapuhnya struktur perusahaan*. Terj, A. Setiawan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998.

Mehden, Fred R. Von Der. *Radical Islam in Southeast Asia and its Challenge to U.S. Policy*. Rice University: The James A. Baker III Institute. 2005.

Rabasa, Angel and Peter Chalk. *Indonesia's Transformation and The Stability of Southeast Asia*. Santa Monica: RAND. 2001.

Saifullah. *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Social: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana. 2011.

Sutrisno, Mudji dan Hendra Putranto. *Hermeneutika Pascakolonial Soal Identsitas*. Yogyakarta: Kansius.2004.

Kuntowijoyo, *Paradigm Islam Interpretasi untuk Aksi* , ed. A.E. Priyono. Bandung : Mizan. 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id